



LAPORAN TAHUNAN

**LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN
TAHUN 2024
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA DENPASAR**

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA DENPASAR
Jalan Kapten Cok Agung Tresna Nomor 4 Denpasar
Telp/Fax (0361) 236213, Email : info@ptun-denpasar.co.id
Website : www.ptun-denpasar.go.id

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat dan rahmat-Nya Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar Tahun 2024 dapat diselesaikan tepat waktu.

Penyusunan Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2024 ini merupakan salah satu bentuk tanggungjawab Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar dalam mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi selama Tahun 2024 yang memuat mengenai laporan pencapaian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar baik secara teknis maupun non teknis. Selain itu, Laporan Pelaksanaan Kegiatan ini sebagai salah satu sarana untuk mewujudkan *good government* melalui transparansi, akuntabilitas dan profesionalitas dalam semua bidang, serta di dukung dengan sumber daya manusia yang berkualitas.

Dalam penyusunan Laporan Pelaksanaan Kegiatan ini, tentunya masih terdapat kekurangan-kekurangan, untuk itu kami mohon arahan, masukan dan kritik yang konstruktif agar dalam penyusunan Laporan Pelaksanaan Kegiatan yang dibuat selanjutnya lebih sempurna.

Selanjutnya, dengan tersusunnya Laporan Pelaksanaan Kegiatan untuk Tahun 2024 ini, tidak lupa kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yaitu kepada Bapak Ketua, Ibu Wakil Ketua, Ibu dan Bapak Hakim, Para Pejabat Struktural maupun Fungsional serta seluruh pegawai dan PPNPN Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar yang telah membantu hingga tersusunnya Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2024 ini.

Akhirnya, semoga dengan tersusunnya Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2024 ini dapat menjadi bahan evaluasi dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi selama Tahun 2024 dan menjadi pedoman dalam menyusun rencana kerja dan program kerja tahun 2025 Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar sehingga dapat mewujudkan Visi dan Misi Mahkamah Agung pada umumnya dan Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar pada khususnya.

Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar
Ketua,

ANNA LEONORA TEWERNUSSA W

DAFTAR ISI

Halaman Judul	
Kata Pengantar.....	i
Daftar Isi.....	ii
Bab I Pendahuluan.....	1
Bab II A. Keadaan Perkara di Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar.....	7
- Keadaan Perkara Tingkat Pertama	
- Keadaan Perkara Tingkat Banding	
- Keadaan Perkara Tingkat Kasasi	
- Keadaan Perkara Tingkat Peninjauan Kembali	
B. Penyelesaian Perkara.....	9
- Jumlah sisa perkara yang diputus	
- Jumlah perkara yang diputus tepat waktu	
- Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding, Kasasi dan PK	
C. Akreditasi Penjaminan Mutu (Sertifikasi ISO Pengadilan).....	12
- Posbakum (Satker yang mendapat alokasi dan realisasi anggaran)	
- Perkara Prodeo (pembebasan biaya perkara)	
Bab III Sumber Daya Manusia.....	14
Komposisi SDM berdasarkan kepangkatan/golongan/pendidikan	
- Mutasi	
- Promosi	
- Pensiun	
- Diklat (SDM Teknis/Non Teknis yang telah mengikuti Diklat)	
Bab IV Pengelolaan Keuangan, Sarana dan Prasarana, dan Teknologi Informasi.....	41
A. Pengelolaan Keuangan	
B. Pengelolaan Sarana dan Prasarana	
C. Pengelolaan Teknologi Informasi	
Bab V Peningkatan Pelayanan Publik.....	50
- Akreditasi Pelayanan Mutu	
- Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)	
- Inovasi Pelayanan Publik	

Bab VI Pengawasan	58
A. Internal	
B. Evaluasi	
Bab VII Penutup.....	62
A. Kesimpulan	
B. Rekomendasi	

BAB I

PENDAHULUAN

A. PROFIL SINGKAT PENGADILAN TATA USAHA NEGARA DENPASAR

Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1994 tentang Pembentukan Pengadilan Tata Usaha Negara di Bandar Lampung, Samarinda dan Denpasar. Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar mulai beroperasi tanggal 25 September 1995, yaitu sejak diresmikan oleh Menteri Kehakiman RI, Bapak Oetoyo Usman, S.H. Dengan terbentuknya Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar, maka wilayah Provinsi Bali yang sebelumnya berada dalam daerah hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Ujung Pandang (Makassar), masuk menjadi wilayah hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar, termasuk wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat sampai dengan tahun 1997.

Di tingkat Banding, Awal berdiri Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar berada dalam wilayah hukum Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya dan kemudian sejak 5 Desember 2022 Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar berada dalam wilayah Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Mataram yang terbentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 tahun 2021, dimana dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2021 menyebutkan daerah hukum Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Mataram meliputi wilayah propinsi Bali, Propinsi Nusa Tenggara Barat dan Propinsi Nusa Tenggara Timur.

Sejak beroperasi dari tanggal 25 September 1995 hingga saat ini, Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar telah dipimpin oleh 17 (Tujuh Belas) orang ketua, di antaranya:

1. Bapak I Ketut Suradnya, S.H, M.H. (1995 s/d 1999);
2. Bapak Iskandar, S.H, M.H. (1999 s/d 2002);
3. Ibu Asinong Kantor, S.H.,M.H. (2000 s/d 2003);
4. Ibu Elly Hadidjah, S.H. (2003 s/d 2006);
5. Bapak Achmad Husein, S.H. (2006 s/d 2007);
6. Bapak Undang Saepudin, S.H, M.H. (2007 s/d 2009);
7. Bapak Endria Sutarmin, S.H.,M.Hum. (2009 s/d 2010);
8. Bapak H. Ariyanto, S.H.,M.H. (2010 s/d 2012);
9. Bapak H. Asmoro Budi Santoso, S.H. (2012 s/d 2014);
10. Bapak Dr. Bambang Priyambodo, S.H, M.H. (2014 s/d 21 Nop 2016).

11. Bapak Mula Haposan Sirait, S.H.,M.H.(21 Nop 2016 s/d 9 Januari 2018)
12. Bapak A.K.Setiyono, S.H.,M.H.(9 Januari 2018 s/d Januari 2019)
13. R.Basuki Santoso, S.H.,M.H. (19 Pebruari 2019 s/d 4 Juni 2020)
14. Setyobudi, S.H.,M.H. (12 Juni 2020 s/d 5 Agustus 2020)
15. Kusman, S.IP.,S.H.,M.Hum. (23 November 2020 s/d 31 Desember 2022)
16. Haryati, S.H.,M.H. (3 Januari 2022 s/d 10 Januari 2023)
17. Dr. Hari Hartomo Setyo Nugroho, S.H.,M.H. (13 Januari 2023 s/d 2 Agustus 2024)
18. Anna Leonora Tewernussa, S.H.,M.H. (2 Agustus 2024 s/d sekarang)

Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar berkedudukan di Kota Denpasar, Ibukota Provinsi Bali, terletak di kawasan perkantoran Pemerintahan Provinsi Bali dan instansi-instansi vertikal, tepatnya di Jalan Kapten Cok Agung Tresna Nomor 4 Denpasar.

Dengan terbentuknya Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 2 Tahun 1997, maka wilayah hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar hanya meliputi seluruh wilayah Provinsi Bali yang terdiri dari 8 (delapan) Kabupaten dan 1 (satu) Kota, yaitu:

1. Kota Denpasar dengan ibukota di Denpasar;
2. Kabupaten Badung dengan ibukota di Mangupura Mengwi;
3. Kabupaten Jembrana dengan ibukota di Negara;
4. Kabupaten Tabanan dengan ibukota di Tabanan;
5. Kabupaten Buleleng dengan ibukota di Singaraja;
6. Kabupaten Bangli dengan ibukota di Bangli;
7. Kabupaten Gianyar dengan ibukota di Gianyar;
8. Kabupaten Klungkung dengan ibukota di Semarapura;
9. Kabupaten Karangasem dengan ibukota di Amlapura.

B. KEBIJAKAN UMUM

Dengan adanya reformasi yang telah lama bergulir dan hingga saat ini masih menyisakan sejumlah agenda termasuk reformasi di dunia peradilan. Pembangunan reformasi di bidang peradilan merupakan sesuatu hal yang sangat penting, Mahkamah Agung sejak tahun 2012 sampai saat ini sudah 11 (sebelas) kali mendapat opini WTP (wajar tanpa pengecualian) dari Badan Pemeriksa Keuangan atas Laporan Keuangan. Peradilan sebagai lembaga terhormat dan seyogyanya harus dihormati oleh masyarakat,

Mahkamah Agung terus berbenah dan terus berjuang untuk menjadi lebih baik, jangan hanya slogan Peradilan yang wilayah bebas dari korupsi (WBK) dan wilayah birokrasi bersih dan melayani (WBBM), Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar di Tahun 2024 mempunyai konsep dan pendirian mencoba berbuat dari hal yang terkecil merubah suatu paradigma baru, terlepas dari semua permasalahan yang ada di dunia peradilan berpendirian bahwa usaha yang sedang dan telah dilakukan selama ini masih belum sampai pada tempat yang kami harapkan, dalam pemikiran kami berharap Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2024 ini bukan saja penting untuk publik namun sangat penting bagi kami sebagai bahan evaluasi dan koreksi bagi kami di lingkungan Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar tentang hal-hal apa yang belum kami perbuat dalam Tahun 2024.

Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar sebagai salah satu Lembaga Peradilan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman yang merdeka, independen, tidak memihak dan kompeten merupakan salah satu komponen utama pencitraan dalam sebuah negara hukum, namun demikian bukan berarti bahwa prinsip-prinsip independensi tersebut dapat mengesampingkan prinsip akuntabilitas maupun transparansi, karenanya kita haruslah mempunyai pemahaman yang memadai dalam menilai hal tersebut.

Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar akan selalu memberi pelayanan prima dengan mengutamakan kepuasan pelayanan publik, terbukti dengan telah dimilikinya sertifikat ISO sejak 21 Desember 2015 dan sudah akreditasi penjaminan mutu pada tanggal 24 sampai dengan 26 Oktober 2017 dengan nilai 88,14 terakreditasi B (Good) dan Surveillance I pada tanggal 12 sampai dengan 14 Februari 2020 dengan nilai 92,95 terakreditasi A (Sangat Baik) juga sudah memperoleh predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK) sejak 20 Desember 2021.

Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2024 Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar ini yang disampaikan melalui Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Mataram dan selanjutnya disampaikan pula ke Mahkamah Agung R.I. merupakan salah satu bentuk akuntabilitas dan salah satu metode untuk menciptakan *checks and balances* sekaligus mekanisme untuk menilai atau mengevaluasi seluruh pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang serta kegiatan, dimana dengan adanya mekanisme pelaporan kegiatan pengadilan sebagai evaluasi dari kegiatan yang dilaksanakan di tahun sebelumnya dan sebagai dasar perencanaan kinerja pada tahun berikutnya.

Dalam mewujudkan tujuan organisasi pada Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar, memiliki *visi* dan *misi* yang mengacu pada *visi* dan *misi* Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar sebagai lembaga peradilan yang berada dibawah Mahkamah Agung R.I. di dalam mencapai tujuan dan keinginan sebagaimana telah diuraikan dalam Kebijakan Umum Peradilan yang ada pada Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar dan juga sebagaimana diuraikan dalam *Blueprint / Cetak Biru* Pembaharuan Mahkamah Agung R.I yang merupakan pedoman/arah pendekatan yang akan ditempuh, Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar mempunyai *visi* dan *misi* sebagai berikut :

Visi :“ Terwujudnya Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar sebagai badan Peradilan
Yang Agung “

dan dalam pelaksanaannya didukung dengan

Misi :

1. Menjaga Kemandirian Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar;
2. Memberikan Pelayanan Hukum yang Profesional dan Berkeadilan kepada Pencari Keadilan;
3. Meningkatkan Kualitas Kepemimpinan dan Kualitas Sumber Daya Manusia di Lingkungan Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar;
4. Meningkatkan Kredibilitas dan Transparansi Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar.

C. RENCANA STRATEGIS

Bahwa didalam mencapai tujuan Visi dan Misi tersebut, sesuai dengan program kerja tahun 2024, maka Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar mempunyai tujuan yang hendak dicapai sebagai berikut :

1. Terlaksananya kemandirian lembaga peradilan tanpa intervensi pihak lain
2. Terlaksananya pelayanan prima bagi masyarakat pencari keadilan dengan efektif, efisien dan berkualitas
3. Terwujudnya pemimpin yang berintegritas tinggi
4. Terwujudnya Sumber Daya Manusia yang professional
5. Meningkatnya kredibilitas dan transparansi PTUN Denpasar
6. Meningkatnya pengelolaan administrasi perkara, keuangan, kepegawaian maupun administrasi umum
7. Terlaksananya pemanfaatan teknologi informasi dan pengelolaan website yang merupakan sasaran bagi masyarakat untuk mencari atau memperoleh informasi yang dibutuhkan

8. Terwujudnya disiplin kerja pegawai
9. Terkelolanya sasaran dan prasarana kantor yang baik
10. Terlaksananya pengawasan melekat maupun pengawasan internal dengan baik
11. Terwujudnya laporan-laporan tepat waktu
12. terselesainya pelaksanaan tugas sesuai dengan SOP

Sasaran strategis yang hendak dicapai Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar adalah sebagai berikut:

1. Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel
2. Peningkatan Efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara
3. Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan
4. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan

Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar dalam memberikan pelayanan peradilan yang prima kepada masyarakat pencari keadilan mempunyai strategi dalam memberikan pelayanan berpedoman pada tiga standard pelayanan peradilan yang cepat, prosedural dan transparan, yang dalam pelaksanaannya yaitu:

- **Cepat** artinya penyelesaian perkara harus sesuai dengan waktu yang ditetapkan ;
- **Prosedural** artinya dalam memberikan pelayanan peradilan harus jelas prosedurnya dan dibakukan sehingga dapat diketahui dengan jelas oleh pencari keadilan, serta jenis dan besarnya biaya perkara didasarkan pada ketentuan yang berdasar hukum ;
- **Transparan** artinya dalam memberikan pelayanan peradilan bersifat terbuka, mudah dan dapat di akses oleh semua pihak yang membutuhkan dan disediakan secara memadai serta mudah dimengerti oleh masyarakat.

Untuk Standar Pelayanan Peradilan Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar telah mengeluarkan Keputusan Ketua PTUN Denpasar dengan Nomor: 141.1/KPTUN.W7-TUN3/SK.HK 1.2.5/I/2024 Tanggal 2 Januari 2024 tentang Standar Pelayanan Peradilan Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar.

Upaya untuk melakukan perbaikan untuk mewujudkan Badan Peradilan Indonesia yang Agung terus menerus dilaksanakan guna mendukung terwujudnya sebagai sebuah badan peradilan yang :

1. Melaksanakan fungsi kekuasaan kehakiman secara independen, efektif dan berkeadilan;

2. Didukung pengelolaan anggaran berbasis kinerja secara mandiri yang di aloksikan secara proporsional dalam APBN;
3. Memiliki struktur organisasi yang tepat dan manajemen organisasi yang jelas dan terukur;
4. Menyelenggarakan manajemen dan administrasi proses perkara yang sederhana, cepat, tepat waktu, biaya ringan dan proporsional;
5. Mengelola sarana prasarana dalam rangka mendukung lingkungan kerja yang aman, nyaman dan kondusif bagi penyelenggara peradilan;
6. Mengelola dan membina sumber daya manusia yang kompeten dengan kriteria obyektif , sehingga tercipta personil peradilan yang berintegritas dan profesional;
7. Didukung pengawasan secara efektif terhadap perilaku, administrasi dan jalannya peradilan;
8. Berorientasi pada pelayanan publik yang prima;
9. Memiliki manajemen informasi yang menjamin akuntabilitas, kredibilitas dan transparansi;
10. Modern dan berbasis TI terpadu.

BAB II

A. KEADAAN PERKARA DI PENGADILAN TATA USAHA NEGARA DENPASAR

Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar merupakan peradilan tingkat pertama yang memiliki wilayah hukum di Propinsi Bali, bertugas menangani sengketa dibidang administrasi pemerintahan yang memiliki wewenang untuk mengadili gugatan terkait keputusan administratif atau tindakan instansi pemerintah lainnya yang dapat merugikan pihak tertentu. Pada tahun 2024 jumlah perkara yang ditangani di Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar, dapat diuraikan sebagai berikut:

- KEADAAN PERKARA TINGKAT PERTAMA

Tabel 2.1 Keadaan Perkara Tingkat Pertama

No	Perkara	Sisa Tahun Lalu	Masuk	Dismissal	Cabut	Putus	Sisa Tahun Ini
A	B	C	D	E	F	G	$F=(C+D)-E$
1	Pertanahan	4	38	2	3	21	16
2	Kepegawaian	0	1	0	0	1	0
3	Perijinan	3	0	0	0	3	0
4	Lingkunngan Hidup	0	0	0	0	0	0
5	Tender/Pengadaan Barang dan jasa	0	0	0	0	0	0
6	Badan Hukum Parpol	0	0	0	0	0	0
7	Kepala Desa dan Perangkat Desa	0	0	0	0	0	0
8	Kepala Daerah	0	0	0	0	0	0
9	Proses Pemilu	0	0	0	0	0	0
10	PAW	0	0	0	0	0	0
11	Ketenagaankerjaan	0	0	0	0	0	0
12	Keterbukaan Informasii Publik	0	1	0	0	1	0
13	Kepentingan Umum	0	0	0	0	0	0
14	FP (Fiktif Positif)	0	0	0	0	0	0
15	Penyalahgunaan Wewenang	0	0	0	0	0	0
16	Tindakan Administratif Pemerintahan	1	1	0	0	1	1
17	Merk	0	0	0	0	0	0
18	Lain-lain	3	3	0	0	4	2
	TOTAL	11	44	2	3	31	19

A . Keadaan Perkara di Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar

1. Gugatan :

- Sisa Tahun Lalu	: 11
- M a s u k	: 44
- J u m l a h	: 55
- P u t u s Gugatan	: 31
- Cabut	: 3
- Dismissal	: 2
- S i s a	: 19

2. Banding :

- Sisa Tahun Lalu	: 5
- M a s u k	: 21
- J u m l a h	: 26
- P u t u s	: 26
- Cabut	: -
- S i s a	: -

3. Kasasi :

- Sisa Tahun Lalu	: 2
- M a s u k	: 24
- J u m l a h	: 26
- P u t u s	: 10
- Cabut	: -
- S i s a	: 16

4. Peninjauan Kembali :

- Sisa Tahun Lalu	: 4
- M a s u k	: 2
- J u m l a h	: 6
- P u t u s	: 4
- Cabut	: -
- S i s a	: 2

5. Permohonan :

- Sisa Tahun Lalu	: -
- M a s u k	: -
- J u m l a h	: -
- P u t u s	: -
- Cabut	: -
- S i s a	: -

6. Perlawanan :

- Sisa Tahun Lalu	: -
- M a s u k	: -
- J u m l a h	: -
- P u t u s	: -
- Cabut	: -
- S i s a	: -

7. Eksekusi :

- Sisa Tahun Lalu	: -
- M a s u k	: 1
- J u m l a h	: 1
- P u t u s	: 1
- Cabut	: -
- S i s a	: -

B . Penyelesaian Perkara**- Jumlah Sisa Perkara Yang diputus****1. Gugatan :**

- Sisa Tahun Lalu	: 11
- M a s u k	:
44	
- J u m l a h	: 55
- P u t u s	: 36
- S i s a	: 19

2. Banding :

- Sisa Tahun Lalu	: 5
- M a s u k	: 21
- J u m l a h	: 26
- P u t u s	: 26
- S i s a	: -

3. Kasasi :

- Sisa Tahun Lalu	: 2
- M a s u k	: 24
- J u m l a h	: 26
- P u t u s	: 10
- S i s a	: 16

4. Peninjauan Kembali :

- Sisa Tahun Lalu	: 4
- M a s u k	: 2
- J u m l a h	: 6
- P u t u s	: 4
- S i s a	: 2

5. Permohonan :

- Sisa Tahun Lalu	: -
- M a s u k	: -
- J u m l a h	: -
- P u t u s	: -
- S i s a	: -

- **Jumlah Perkara yang diputus tepat waktu :**

No	Nomor Perkara	Tanggal pendaftaran	Tanggal putus	Jumlah	Keterangan
1	18/G/2023/PTUN.DPS	29/8/2023	29/1/2024		(Bdg, Kasasi)
2	19/G/2023/PTUN.DPS	29/8/2023	29/1/2024		(Bdg, Kasasi)
3	20/G/TF/2023/PTUN.DPS	29/8/2023	25/1/2024		(Bdg, Kasasi)
4	21/G/2023/PTUN.DPS	20/9/2023	16/1/2024		Inchraht TKI
5	23/G/2023/PTUN.DPS	3/10/2023	19/2/2024		(Bdg, Kasasi)
6	24/G/2023/PTUN.DPS	4/10/2023	6/3/2024		(Bdg, Kasasi)
7	25/G/2023/PTUN.DPS	16/10/2023	5/3/2024		Inchraht TKI
8	26/G/2023/PTUN.DPS	19/10/2023	6/3/2024		(Bdg, Kasasi)
9	27/G/2023/PTUN.DPS	29/11/2023	3/4/2024		(Bdg, Kasasi)
10	28/G/2023/PTUN.DPS	11/12/2023	16/5/2024		(Bdg, Kasasi)
11	29/G/2023/PTUN.DPS	27/12/2023	22/5/2024		(Bdg, Kasasi)
12	1/G/2024/PTUN.DPS	12/6/2024	2/7/2024		Inchraht TK I
13	2/G/2024/PTUN.DPS	4/1/2024	30/5/2024		(Bdg, Kasasi)
14	3/G/2024/PTUN.DPS	21/5/2024	5/6/2024		Inchraht TK I
15	4/G/2024/PTUN.DPS	12/6/2024	27/6/2024		Inchraht TK I
16	5/G/2024/PTUN.DPS	14/6/2024	29/6/2024		Inchraht TK I
17	6/G/2024/PTUN.DPS	2/2/2024	28/6/2024		(Bdg, Kasasi)
18	7/G/2024/PTUN.DPS	16/2/2024	13/3/2024		Dicabut
19	8/G/2024/PTUN.DPS	19/2/2024	10/7/2024		Inchraht TK I
20	9/G/2024/PTUN.DPS	23/2/2024	23/7/2024		Inchraht TK I
21	10/G/2024/PTUN.DPS	1/3/2024	23/7/2024		(Bdg, Kasasi)
22	11/G/2024/PTUN.DPS	4/3/2024	24/7/2024		(Bdg)
23	12/G/2024/PTUN.DPS	5/3/2024	12/6/2024		(Bdg, Kasasi)
24	13/G/2024/PTUN.DPS	5/3/2024	23/7/2024		(Bdg, Kasasi)
25	14/G/2024/PTUN.DPS	25/3/2024	12/7/2024		(Bdg, Kasasi)
26	15/G/2024/PTUN.DPS	26/3/2024	26/7/2024		Inchraht TK I
27	16/G/2024/PTUN.DPS	27/3/2024	6/8/2024		(Bdg, Kasasi)
28	17/G/2024/PTUN.DPS	14/5/2024	14/5/2024		(Bdg, Kasasi)
29	18/G/2024/PTUN.DPS	14/5/2024	9/8/2024		(Bdg, Kasasi)
30	19/G/2024/PTUN.DPS	31/5/2024	8/10/2024		(Bdg, Kasasi)
31	20/G/2024/PTUN.DPS	7/6/2024	13/6/2024		Dismissal
32	21/G/2024/PTUN.DPS	25/7/2024	-		-
33	22/G/2024/PTUN.DPS	25/7/2024	-		-
34	23/G/2024/PTUN.DPS	30/7/2024	8/8/2024		Dicabut

No	Nomor Perkara	Tanggal pendaftaran	Tanggal putus	Jumlah	Keterangan
35	24/G/2024/PTUN.DPS	30/7/2024			
36	25/G/2024/PTUN.DPS	2/8/2024			
37	26/G/2024/PTUN.DPS	9/8/2024			
38	27/G/2024/PTUN.DPS	12/8/2024	16/8/2024		Dismissal
39	28/G/2024/PTUN.DPS	28/8/2024			
40	29/G/2024/PTUN.DPS	6/9/2024			
41	30/G/2024/PTUN.DPS	18/9/2024			
42	31/G/KI/2024/PTUN.DPS	23/9/2024	18/12/2024		Kasasi
43	32/G/2024/PTUN.DPS	30/9/2024			
44	33/G/2024/PTUN.DPS	11/10/2024	21/11/2024		Dicabut
45	34/G/2024/PTUN.DPS	11/10/2024			
46	35/G/2024/PTUN.DPS	25/10/2024			
47	36/G/2024/PTUN.DPS	30/10/2024			
48	37/G/2024/PTUN.DPS	28/11/2024			
49	38/G/2024/PTUN.DPS	4/12/2024			
50	39/G/2024/PTUN.DPS	5/12/2024			
51	40/G/2024/PTUN.DPS	6/12/2024	16/12/2024		Dicabut
52	41/G/2024/PTUN.DPS	6/12/2024			
53	42/G/2024/PTUN.DPS	16/12/2024			
54	43/G/2024/PTUN.DPS	18/12/2024			
55	44/G/2024/PTUN.DPS	19/12/2024			
		Jumlah		36	

- **Jumlah Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding, Kasasi dan PK**

NO	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1.	Jumlah Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding	16 Perkara	1. 21/G/2023/PTUN.DPS 2. 25/G/2023/PTUN.DPS 3. 1/G/2024/PTUN.DPS 4. 4/G/2024/PTUN.DPS 5. 5/G/2024/PTUN.DPS 6. 6/G/2024/PTUN.DPS 7. 7/G/2024/PTUN.DPS 8. 8/G/2024/PTUN.DPS

NO	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
			9. 9/G/2024/PTUN.DPS 10. 15/G/2024/PTUN.DPS 11. 20/G/2024/PTUN.DPS 12. 23/G/2024/PTUN.DPS 13. 27/G/2024/PTUN.DPS 14. 31/G/2024/PTUN.DPS 15. 33/G/2024/PTUN.DPS 16. 40/G/2024/PTUN.DPS
2.	Jumlah Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi	2 Perkara	1. 24/G/2023/PTUN.DPS 2. 11/G/2023/PTUN.DPS
3.	Jumlah Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali /PK	9 Perkara	1. 7/G/KI/2023/PTUN.DPS 2. 3/G/2023/PTUN.DPS 3. 16/G/2023/PTUN.DPS 4. 9/G/2023/PTUN.DPS 5. 10/G/TF/2023/PTUN.DPS 6. 13/G/2023/PTUN.DPS 7. 23/G/2023/PTUN.DPS 8. 20/G/TF/2023/PTUN.DPS 9. 26/G/2023/PTUN.DPS

B. AKREDITASI PENJAMINAN MUTU (SERTIFIKAS ISO PENGADILAN)

Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar senantiasa meningkatkan pelayanan kepada masyarakat khususnya pelayanan kepada pengguna layanan pengadilan, sehingga pelayanan prima dapat diwujudkan agar kesejahteraan masyarakat dapat selalu ditingkatkan. Pelaksanaan peningkatan pelayanan telah diwujudkan diantaranya yaitu sudah pernah memiliki sertifikat ISO-90001 sejak 21 Desember 2015 dan sudah akreditasi penjaminan mutu pada tanggal 24 sampai dengan 26 Oktober 2017 dengan nilai 88,14 terakreditasi B (*Good*) dan *Surveillance* I pada tanggal 12 sampai dengan 14 Februari 2020 dengan nilai 92,95 terakreditasi A (Sangat Baik) juga sudah melaksanakan Reformasi Birokrasi dengan program Zona Integritas dan telah meraih predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) sejak 20 Desember 2021.

Dalam pengelolaan anggaran pada Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar tersedia anggaran untuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat diantaranya yaitu:

- Posbakum (Satker yang mendapat alokasi dan realisasi anggaran)

Pengelolaan Anggaran Negara pada Tahun 2024 tersedia pada DIPA 05 berupa layanan jasa Posbakum (Pos Bantuan Hukum). Layanan ini dilaksanakan dengan melakukan kerjasama dengan organisasi advokat. Layanan ini dilakukan sesuai dengan Perma 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu. Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar sudah melaksanakan layanan ini dengan menyediakan ruangan bagi advokat piket dalam memberikan layanan bantuan hukum kepada pemohon bantuan hukum.

Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar pada Tahun 2024 sudah melaksanakan Perjanjian Kerjasama dengan Posbakumadin Denpasar dan sudah memberikan Surat Perintah Kerja (SPK) untuk pelayanan di Posbakum Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar.

Jenis layanan yang dapat diberikan oleh petugas Posbakum yaitu:

- 1) Memberikan informasi, konsultasi dan Advis hukum;
- 2) Bantuan pembuatan dokumen hukum;
- 3) Penyediaan informasi daftar organisasi bantuan hukum.

Dari anggaran jasa Posbakum yang tersedia pada tahun anggaran 2024 sejumlah: **Rp. 33.000.000,-** (tiga puluh tiga juta rupiah), Terserap Rp. 32.924.000,- (tiga puluh dua juta sembilan ratus dua puluh empat ribu rupiah), Sisa Rp. 76.000,- (tujuh puluh enam ribu rupiah).

Dapat dijelaskan bahwa anggaran jasa Posbakum terserap 99,77%.

- Perkara Prodeo (pembebasan biaya perkara)

Layanan prodeo diperuntukan bagi masyarakat tidak mampu yang beracara di Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar. Pada Tahun 2024 tersedia anggaran Prodeo untuk satu layanan kepada pihak berperkara yang tidak mampu, anggarannya sebesar Rp. 510.000,- dan terserap 100%.

Anggaran ini sudah terlaksana peruntukannya untuk pihak berperkara yang tidak mampu.

BAB III

SUMBER DAYA MANUSIA

A. KEADAAN SUMBER DAYA MANUSIA

Jumlah Hakim dan Pegawai Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar pada bulan Desember 2024 adalah **35 orang** dengan rincian sebagai berikut :

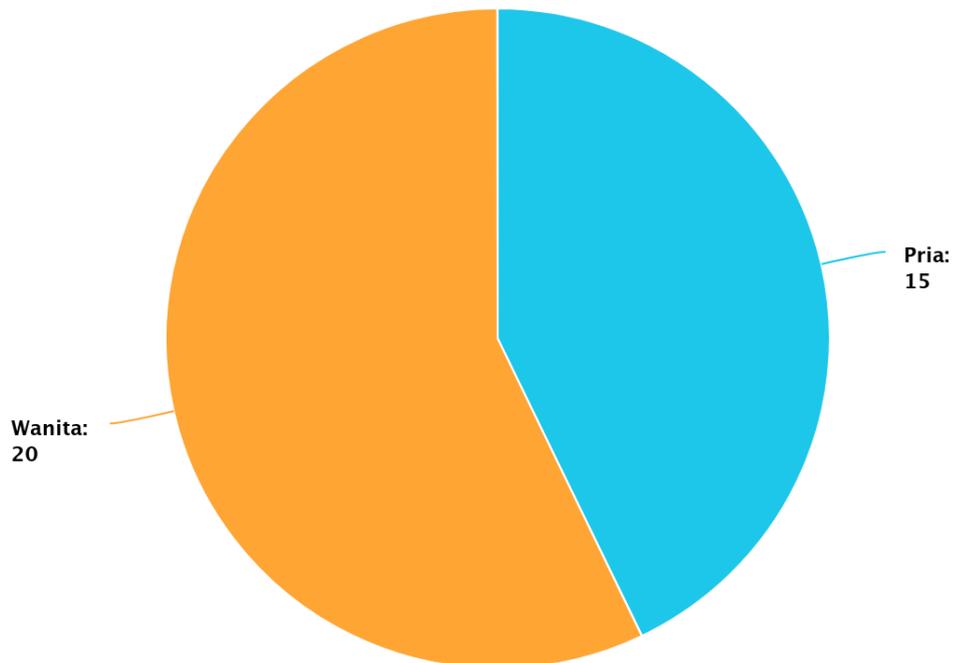
1. Ketua : Anna Leonora Tewernussa, S.H., M.H.
2. Wakil Ketua : Indah Mayasari, S.H., M.H.
3. Panitera : Wiwied Kurniawan, S.H.,M.H.
4. Sekretaris : Dr. Ni Made Yeni Widayani, S.H.,M.M
5. Panitera Muda Perkara : Putu Suryadana S.H.
6. Panitera Muda Hukum : I Nengah Wijana, S.H.
7. Kasub Bag Umum dan
Keuangan : Ni Luh Putu Ayu Kurniasih, S.E.
8. Kasub Bag Perencanaan, IT
dan Pelaporan : Putu Eka Aryawati, S.H.
9. Kasub Bag Kepegawaian,
Organisasi dan Tata Laksana : Drs. Anak Agung Gede Sedana.
10. Hakim : 4 Orang
11. Panitera Pengganti : 11 Orang
12. Juru Sita Pengganti : 2 Orang
13. Jabatan Fungsional : 6 Orang
14. Pelaksana : 1 Orang
15. CPNS : 2 Orang

TABEL KEADAAN PEGAWAI :

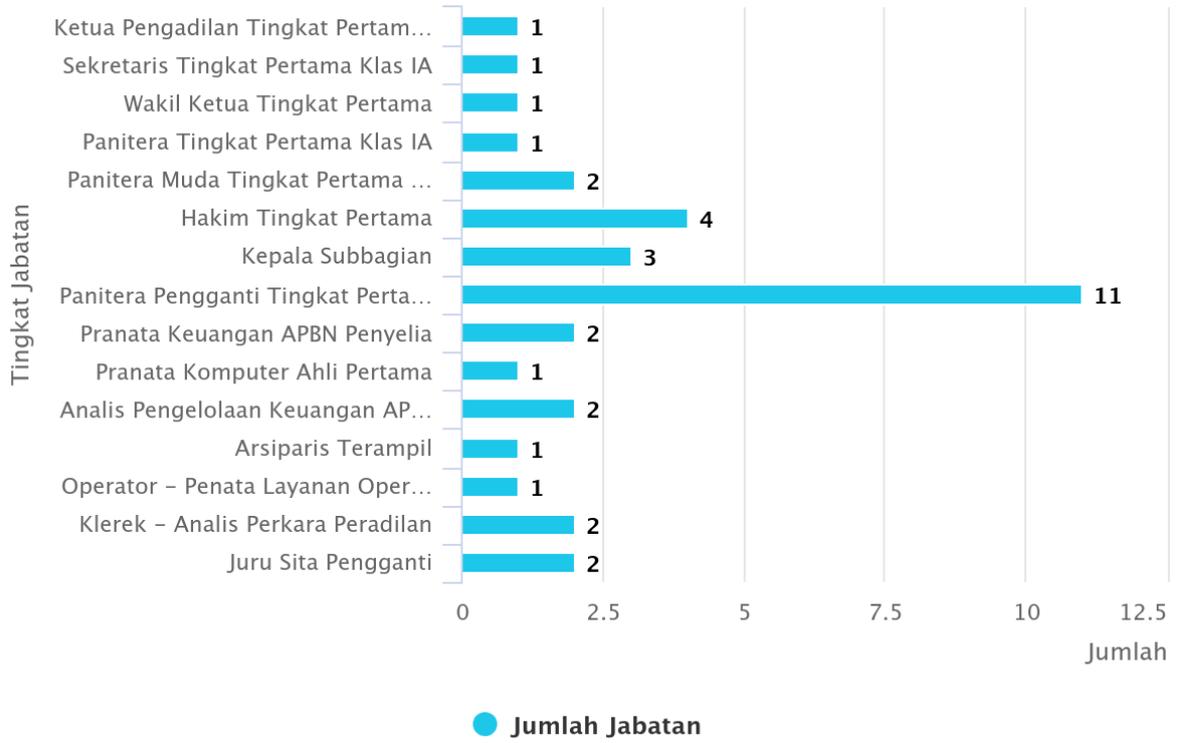
NO	GOL/RUANG	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
1.	IV/d	-	-	-
2.	IV/c	-	2	2

NO	GOL/RUANG	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
3.	IV/b	1	1	2
4.	IV/a	-	-	0
5.	III/d	9	13	22
6.	III/c		1	1
7.	III/b	1	1	2
8.	III/a	3	1	4
9.	II/d	-	-	-
10.	II/c	1	1	2
11.	II/b	-	-	-
12.	II/a	-	-	-
	JUMLAH	15	20	35

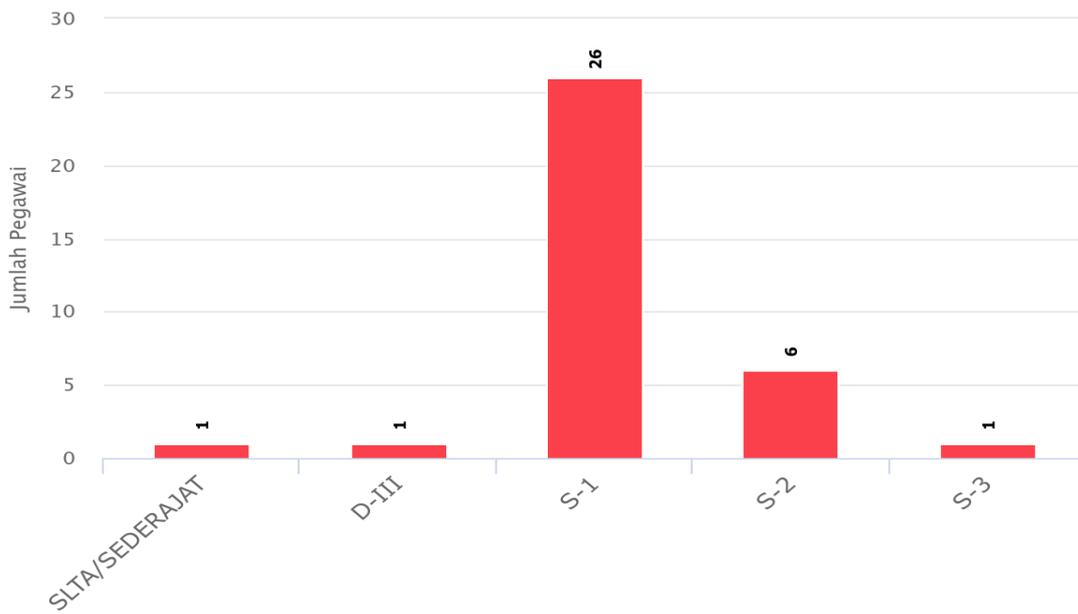
STATISTIK JENIS KELAMIN PEGAWAI



TINGKAT JABATAN PEGAWAI



TINGKAT PENDIDIKAN PEGAWAI



B. Pengadaan Pegawai

1. Telah melapor untuk melaksanakan tugas dan dilaksanakan administrasi Kepegawaian CPNS baru sebanyak 2 orang, a.n.
 1. Ni Luh Putu Utami Rasi Megantari, S.H.
 2. I Gede Khrisna Dharma Putra, S.H.
2. Telah dilaksanakan pendampingan dan administrasi pengadaan PPPK
3. Telah dilaksanakan dukungan sebagai panitia Seleksi Kompetensi Bidang Non CAT pada Seleksi Pengadaan CPNS

C. Kenaikan Pangkat/ Golongan

1. Pengiriman daftar nominatif Kenaikan Pangkat Pilihan Pejabat Panitera PTUN Denpasar a.n. Wiwied Kurniawan, S.H., M.H. dan update data pada aplikasi SIKEP dan SIASN. Telah diterima Surat Keputusan Kenaikan Pangkat Pilihan Pejabat Panitera PTUN Denpasar a.n. Wiwied Kurniawan, S.H., M.H. Kenaikan Pangkat menjadi Golongan /Ruang (IV/b) dengan TMT per 1 Oktober 2024
2. Telah dilaksanakan pengusulan pangkat/golongan ruang III/d (Penata Tingkat I) TMT 1 Desember 2024 dan selanjutnya telah diterima SK Kenaikan Pangkat Pilihan Jabatan Fungsional Analisis Pengelolaan Keuangan APBN atas nama Kadek Seri Budiayana, S.Pd.

D. KGB

1. Telah dilaksanakan Kenaikan Gaji Berkala 4 orang Aparatur TMT 1 April 2024, a.n.
 1. I Nyoman Sujana, S.H.
 2. I Nyoman Tilem, S.H.
 3. Ni Luh Puspawati, S.H.
 4. I Nyoman Arya Yuda Bakti
2. Telah diterbitkan Kenaikan Gaji Berkala TMT 1 Oktober 2024, a.n.
 1. Drs. Anak Agung Gede Sedana
 2. I Nengah Wijana, S.H.
3. Telah diterbitkan Surat Kenaikan Gaji Berkala TMT 1 Desember 2024, atas nama:
 1. Indah Mayasari, S.H., M.H.
 2. Made Parahita Saguna, S.T.
 3. Rini Kurniawati, A.Md.
4. Telah diterbitkan Surat Kenaikan Gaji Berkala TMT 1 Januari 2025, atas nama:
 1. Dewi Yustitiani, S.H., M.Kn.

2. Ivan Pahlavia Islamy, S.H..
3. Ni Putu Juliartini, S.E.
4. Kadek Seri Budiyana, S.Pd.
5. Telah diterbitkan Surat Kenaikan Gaji Berkala TMT 1 Februari 2025, atas nama:
 1. Ni Luh Putu Ayu Kurniasih, S.E.

E. Pengelolaan Kompetensi

1. Telah dikirimkan usul, selanjutnya telah diterima izin melanjutkan pendidikan di luar jam kekinasan untuk jenjang Strata-2 (S-2) Administrasi Publik, atas nama:
 1. Putu Eka Aryawati, S.H.
 2. Ni Luh Putu Ayu Kurniasih, S.E.

F. Manajemen Kinerja

1. Telah dilaksanakan pengelolaan proses penyusunan Rencana Hasil Kerja Tahunan, Rencana Aksi, dan Pengisian Bukti Dukung SKP Tahun 2024 serta telah dilaksanakan pengelolaan Penilaian Evaluasi Kinerja-SKP pada Aplikasi E-Kinerja BKN untuk Triwulan I, II, III, IV dan Tahunan Tahun 2024
2. Telah dilaksanakan Penilaian Kerja PPNPN Triwulan I,II,III, IV dan Tahunan Tahun 2024
3. Telah dilaksanakan Pengelolaan Penyusunan Kinerja Pegawai (PKP) Tahun 2024 serta Penilaian Capaian Kinerja (PCK) Bulanan yang nilainya diinput pada aplikasi Komdanas MA RI di hari kerja pertama setiap bulannya.

G. Promosi dan Mutasi

1. Telah dilaksanakan Seleksi Kompetensi Bidang Seleksi Pengisian JPT Pratama sebagai Sekretaris Pengadilan Negeri Sidoarjo Kelas I A Khusus, a.n. Dr. Ni Made Yeni Widayani, S.H., M.M.
2. Telah diterima Surat Pernyataan Persetujuan menjadi tenaga teknis peradilan dari Plt. Sekretaris Mahkamah Agung RI a.n. Kadek Ayu Wina Sari Purnamadewi, S.E., S.H.
3. Telah diterima SK Promosi Jabatan Fungsional, a.n.
 1. Desak Tri Wisnawati, S.H., S.T. sebagai Analis Pengelolaan Keuangan APBN Jenjang Ahli Muda
 2. Qamarullah, S.Sos. sebagai Pranata Keuangan APBN Jenjang Penyelia

4. Telah diterima SK Promosi dan dilaksanakan Pelantikan Jabatan Panitera dan Panitera Pengganti, a.n.
 1. Wiwied Kurniawan, S.H., M.H.. sebagai Panitera PTUN Denpasar
 2. Ayu Sinta Dewi Kusumasari, S.H. sebagai Panitera Pengganti PTUN Denpasar.
 3. Kadek Ayu Winasari Purnamadewi, S.T., S.H. sebagai Panitera Pengganti PTUN Denpasar
5. Telah diselesaikan dan dikirim berkas Permohonan Pembayaran Biaya Mutasi Pindah, a.n.
 - a. Dr. Hari Hartomo Setyo Nugroho, S.H., M.H.
 - b. Zubaida Djaiz Baranyanan, S.H., M.H.
 - c. Dewi Maharati, S.H., M.H.
 - d. Arief Aditya Lukman, S.H., M.H.
 - e. Dessy Anggraeny, S.H.
 - f. Mohammad Zahid, S.H., M.H.
 - g. Agustina, S.H.
6. Telah diselesaikan Administrasi Kepegawaian dalam rangka Mutasi (Penerbitan Keterangan Dinas Luar, Keterangan Sisa Cuti, Pengiriman Berkas Kepegawaian dan Menghadap Untuk Melaksanakan Tugas pada Satker Baru), a.n.
 - a. Dr. Hari Hartomo Setyo Nugroho, S.H., M.H.
 - b. Dewi Maharati, S.H., M.H.
 - c. Dessy Anggraeny, S.H.
 - d. Mohammad Zahid, S.H., M.H.
7. Telah dilaksanakan Pelantikan Jabatan Ketua dan Wakil Ketua, a.n.
 - a. Anna Leonora Tewernussa, S.H., M.H. telah dilantik sebagai Ketua PTUN Denpasar pada tanggal 2 Agustus 2024 di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Mataram
 - b. Indah Mayasari, S.H., M.H. telah dilantik sebagai Wakil Ketua PTUN Denpasar pada tanggal 12 Agustus 2024 di Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar.
8. Telah dilaksanakan Administrasi Mutasi Keluar berkenaan dengan surat-surat, berkas serta mutasi SIKEP dan Komdanas, a.n.
 - a. Dr. Hari Hartomo Setyo Nugroho, S.H., M.H.
 - b. Zubaida Djaiz Baranyanan, S.H., M.H.
 - c. Dewi Maharati, S.H., M.H.
 - d. Arief Aditya Lukman, S.H., M.H.
 - e. Dessy Anggraeny, S.H.

- f. Agustina, S.H.
- 9. Telah dilaksanakan Administrasi Mutasi Masuk berkenaan dengan surat-surat, berkas serta mutasi SIKEP dan Komdanas, a.n.
 - a. Anna Leonora Tewernussa, S.H., M.H.
 - b. Indah Mayasari, S.H., M.H.
 - c. Mohamad Fahrur Risqy, S.H., M.H.
- 10. Telah dilaksanakan baperjakat dan pengiriman berkas usulan perubahan jabatan untuk pejabat eselon IV, a.n.
 - 1. Drs. Anak Agung Gede Sedana
 - 2. Putu Eka Aryawati, S.H., dan
 - 3. Ni Luh Putu Ayu Kurniasih, S.E.

H. Pelantikan

- 1. Telah dilaksanakan Pelantikan Jabatan Fungsional, a.n.
 - a. Desak Tri Wisnawati, S.H., S.T. sebagai Analis Pengelolaan Keuangan APBN Jenjang Ahli Muda
 - b. Qamarullah, S.Sos. sebagai Pranata Keuangan APBN Jenjang Penyelia
- 2. Telah dilaksanakan Pelantikan Panitera dan Panitera Pengganti
 - a. Indah Mayasari, S.H., M.H. sebagai Pelantikan Wakil Ketua

I. Pengelolaan Cuti /Ketidakhadiran

Jumlah Surat Permohonan Cuti, Izin Tidak Masuk Kantor Bagi Hakim sebanyak 2 kali dalam setahun dan Dinas Luar yang telah diproses selama tahun 2024 yaitu sebagai berikut:

- * Cuti Tahunan sebanyak 139 Surat
- * Cuti Sakit sebanyak 32 Surat
- * Cuti Alasan Penting sebanyak 10 Surat
- * Cuti Melahirkan nihil.
- * Cuti Besar serta Izin Keluar Negeri Untuk Ibadah sebanyak 1 Surat
- * Izin Tidak Masuk Kantor sebanyak 2 Surat
- * Dinas Luar sebanyak 74 Surat

J. BPJS

Telah dikirim berkas Komitmen Perpanjangan Kepesertaan Aktif JKN dari PPNPN PTUN Denpasar Tahun 2025

K. Penghargaan Satya Lencana

Telah diterima dan disampaikan kepada yang bersangkutan berupa SK, Piagam dan Lencana Penghargaan Satya Lencana Karya Satya XXX Tahun, a.n.;

1. Ni Wayan Senitari, S.H.
2. Ni Kompiang Sunarsih, S.H.
3. Ni Luh Puspawati, S.H.
4. I Nyoman Sujana, S.H. 5.
5. Drs. Anak Agung Gede Sedana
6. Luh Putu Asmariyani, S.H.
7. Ni Kadek Sri Sugih Asih Sangging, S.H.

L. Pensiun

1. Telah diterima Surat Keputusan Pensiun atas nama:
 1. I Nyoman Sujana, S.H.
2. Telah dikirim berkas usul pension (BUP) atas nama:
 1. Drs. Anak Agung Gede Sedana
 2. I Wayan Sina, S.H.

M. Surat Tugas

Telah diselesaikan Surat Tugas sebanyak 88 surat

N. LHKAN (SPT dan LHKPN)

Telah mengirim ke tingkat banding data Validasi Penyelenggara Negara / Wajib LHKPN Tahun 2024

O. PLH/PLT

Telah diselesaikan Surat Plh. sebanyak 44 surat

P. Identitas Pegawai

Telah diterima dari BKN KANRG X, Karis ASN a.n. I Kadek Suwawa Kiki Kesuma Dewa, S.H.

Q. Kegiatan Ortala

1. Telah membuat Rencana Kerja Sub Bagian Kepegawaian
2. Telah membuat uraian manajemen resiko Sub Bagian Kepegawaian
3. Telah menyelesaikan 89 Surat Keputusan Pimpinan

R. Pengawasan dan Pemantauan

1. Rapat Rutin Bulanan Setiap Bulannya secara berjenjang di tahun 2024
2. Apel Pagi pada pukul 08.00 WITA di setiap hari Senin dan Apel Sore pada pukul 16.30 WITA di setiap hari Jumat.

S. Pengembangan Kompetensi SDM Aparatur

Telah dilaksanakan Diklat/Bimtek sebagai berikut:

NO	NAMA/NIP	JABATAN/ PANGKAT/ GOL. RUANG	NAMA DIKLAT (TANGGAL)	KET.
1	Arief Aditya Lukman, S.H., M.H. NIP. 198706052011011013	Hakim Pratama Utama Penata Tk.I (III/d)	Bimbingan Teknis Sengketa Pegawai ASN bagi Hakim di Lingkungan PTUN Seluruh Indonesia (Daring: 05 s.d. 07 Februari 2024)	Online via zoom meeting
2	Mohammad Zahid, S.H., M.H. NIP. 197102201991031001	Panitera Pembina Tk.I (IV/b)	Bimbingan Teknis Kepaniteraan di Lingkungan PT TUN Mataram (Luring: 05 s.d. 07 Maret 2024)	Golden Palace Hotel Lombok
3	I Nyoman Tilem, S.H. NIP. 196802031993031007	Panitera Pengganti Penata Tk.I (III/d)	-sda-	-sda-
4	I Nyoman Gde Suyana, S.H. NIP. 198111222012121003	Juru Sita Pengganti Penata Tk.I (III/d)	-sda-	-sda-

NO	NAMA/NIP	JABATAN/ PANGKAT/ GOL. RUANG	NAMA DIKLAT (TANGGAL)	KET.
5	Simson Seran, S.H., M.H. NIP.198209112009121002	Hakim Pratama Utama Penata Tk.I (III/d)	Pelatihan Singkat Sengketa Administrasi Secara Elektronik dan Persidangan Elektronik (E-Litigation) bagi Hakim Peradilan Tata Usaha Negara Seluruh Indonesia (Daring: 05 s.d. 07 April 2024) (Luring: 16 s.d. 21 April 2024)	Online via zoom meeting dan Klasikal di Hotel Grandhika Pemuda Semarang
6	Arief Aditya Lukman, S.H.,M.H. NIP.198706052011011013	Hakim Pratama Utama Penata Tk.I (III/d)	-sda-	-sda-
7	Dessy Anggraeni, S.H. NIP.198412082011012012	Hakim Pratama Utama Penata Tk.I (III/d)	-sda-	-sda-
8	Mohammad Zahid, S.H., M.H. NIP.197102201991031001	Panitera Pembina Tk.I (IV/b)	Pelatihan Keterbukaan Informasi Publik (Luring: 17 s.d. 19 April 2024)	Hotel Grandhika Pemuda Semarang
9.	Zubaida Djais Baranyanan, S.H., M.H. NIP. 197506022000122002	Wakil Ketua Pembina Utama Muda / (IV/c).	Bimbingan Teknis Pendahalaman Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan Kepala Daerah Bagi Hakim di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara (Daring: 20 s.d. 22 Mei 2024)	Online via zoom meeting Online via zoom meeting
10	I Putu Suryadana, S.H. NIP.197102201991031001	Panitera Muda Perkara Penata Tk.I (III/d)	Bimbingan Teknis Upaya Hukum secara Elektronik bagi Panitera Muda Perkara di Peradilan Tata Usaha Negara Tahun Anggaran 2024 (Daring: 20 s.d. 22 Mei 2024)	Online Via zoom meeting
11	Dewi Maharati, S.H., M.H. NIP.	Hakim Pratama Utama / (III/d).	Bimbingan Teknis Pendahalaman Gugatan melalui <i>Citizen Law Suit</i>	GKN I Denpasar

NO	NAMA/NIP	JABATAN/ PANGKAT/ GOL. RUANG	NAMA DIKLAT (TANGGAL)	KET.
12	Qamarullah, S.Sos. NIP.	Bendahara Penata Tk.I (III/d)	<i>(CLS), Class Action dan Legal Standing</i> bagi Hakim di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara (Daring: 26 s.d. 28 Juni 2024) Bimbingan Teknis Implementasi Tanda Tangan Elektronik (TTE) SAKTI III (Luring : 25 Juni 2024)	Online Via zoom meeting
13	Ivan Pahlavia Islamy, S.H. NIP. 198711112011011007	Hakim Pratama Utama / (III/d).	Bimbingan Teknis Sengketa Pengesahan Badan Hukum bagi Hakim di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara (Daring: 24 s.d. 26 Juli 2024)	Online Via zoom meeting
14	Wiwied Kurniawan, S.H., M.H. NIP. 197908301999031001	Panitera/ (IV/a)	Sosialisasi Pedoman Eksekusi Putusan Pengadilan di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara (Daring: 24 s.d. 26 Juli 2024)	-sda-
15	I Putu Suryadana, S.H. NIP. 196604131991031005	Panitera Muda Perkara (III/d)	-sda-	Online Via zoom meeting
16	Ni Putu Suparwati, S.H. NIP. 198304162009042008	Panitera Pengganti (III/d)	Bimbingan Teknis Penyusunan Berita Acara Persidangan bagi Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Tahun Anggaran 2024 (Daring: 24 s.d. 26 Juli 2024)	Online Via zoom meeting
17	Dr. Ni Made Yeni Widayani, S.H., M.M. NIP. 197204171992032002	Sekretaris/ (IV/b)	Pelatihan Online Manajemen Pengelolaan Barang Milik Negara Batch VI Bekerjasama dengan Diklat PKN BPK RI (Online: 11 s.d. 13 November 2024)	Pengadilan Tinggi Denpasar Jalan Tantular Barat No. 1 Denpasar
18	Dr. Ni Made Yeni Widayani, S.H., M.M.	Sekretaris/ (IV/b)	Bimbingan Teknis Pelaksanaan Sertifikasi	- sda-

NO	NAMA/NIP	JABATAN/ PANGKAT/ GOL. RUANG	NAMA DIKLAT (TANGGAL)	KET.
19	NIP. 197204171992032002 Ni Luh Putu Ayu Kurniasih, S.E. NIP. 198103152005022002	Ka. Sub Bag. Umum dan Keuangan/ (III/d)	Aset Tanah Pemerintah Secara Elektronik Pada Satuan Kerja Wilayah Bali (Offline: 28 November 2024) - sda-	- sda-
20	Kadek Seri Budiayana, S.Pd. NIP. 198507112011011008	Analisis PK APBN Ahli Muda/ (III/c)	- sda-	-Online : E- Learning -Klasikal On I: Hotel Grand Mercure Jakarta Harmoni
21	Wiwied Kurniawan, S.H., M.H. NIP. 197908301999031001	Panitera/ (IV/b)	Pelatihan Manajemen dan Kepemimpinan bagi Panitera Pengadilan secara Blended Learning Tahun 2024 (Blended: 26 Desember s.d. 29 Januari 2024	-Klasikal On II: Kampus Badan Strategi Kebijakan Diklat Kumdil MA-RI

T. Dukungan terhadap Program Kerja Pimpinan

1. Pelaksanaan penandatanganan pakta Integritas, perjanjian tahunan dan komitmen bersama dalam rangka mewujudkan wilayah birokrasi bersih dan melayani tahun 2024 pada tanggal 2 Januari 2024.
2. Pelaksanaan Perayaan HUT PERATUN pada tanggal 14 Januari 2024
3. Kunjungan KKL Universitas Abdurachman Saleh Situbondo pada tanggal 5 Februari 2024
4. Pelepasan Mahasiswa Magang dari Universitas Udayana dan Universitas Raden Intan Lampung pada tanggal 5 Februari 2024
5. Audiensi Komisi Informasi Publik Daerah Bali pada tanggal 6 Februari 2024
6. Kunjungan YM Ketua Mahkamah Agung RI beserta Jajaran Pimpinan MA RI (termasuk Direktur Bimbingan TUN) Pada tanggal 23 Februari 2024.
7. Rapat Koordinasi dan Pembinaan dari Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara Mahkamah Agung RI secara daring.

8. Pelepasan Siswa PKL dari SMKN 2 Denpasar.
9. Pembinaan Rutin dari PT TUN Mataram Pembinaan terhadap jalannya peradilan menyangkut administrasi peradilan maupun manajemen peradilan pada tanggal 26 s.d 28 Maret 2024.
10. Upacara Bendera Peringatan Hari Kebangkitan Nasional Ke 116 pada 20 Mei 2024.
11. Upacara Bendera Peringatan Hari Lahir Pancasila pada 1 Juni 2024.
12. Pengawasan Daerah oleh Tim Pengawasan PTTUN Mataram juni
13. Mengikuti Kegiatan Monev hasil Tindak Lanjut Pengawasan dari Pengadilan Tinggi TUN Mataram. Juli
14. Pelaksanaan Upacara Bendera HUT RI Ke 79 pada tanggal 17 Agustus 2024
Pelaksanaan Upacara Bendera dan Perayaan Peringatan HUT MA RI Ke 79 pada tanggal 19 Agustus 2024
15. Pelaksanaan Upacara Peringatan Hari Kesaktian Pancasila dan Upacara Bendera Peringatan Hari Sumpah Pemuda Ke-96
16. Pelaksanaan Kegiatan Outing dan Public Campaign Pelayanan PTUN Denpasar.
17. Pelaksanaan HUT Dharmayukti Karini oleh Dharmayukti Karini Daerah Bali dan Cabang Denpasar.
18. Mengikuti Kegiatan Monev hasil Tindak Lanjut Pengawasan dari Pengadilan Tinggi TUN Mataram. Oktober
19. Pelaksanaan Upacara Peringatan Hari Pahlawan pada tanggal 10 November 2024.
20. Menerima dan Pengaturan Mahasiswa PKL Universitas Mahendradatta
21. Pelaksanaan Pembinaan dari Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara MA RI.
22. Pelaksanaan Penyambutan Pembinaan dari Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Mataram. Desember
23. Telah dilaksanakan Pengantar Purnabakti Panitera Pengganti atas nama I Nyoman Sujana, S.H.

a. Profil Sumber Daya Manusia Teknis Yudisial

HAKIM

NAMA : ANNA LEONORA TEWERNUSSA, S.H.,
M.H.
NIP : 197212111998032002
Tempat Tanggal Lahir : Kupang, 11 Desember 1972
Pangkat/Golongan : Pembina Utama Muda / (IV/c)
Jabatan : Ketua PTUN. Denpasar
Email : annaleonoratewernussa@mahkamahagung.go.id
Alamat : Rumah Dinas Ketua PTUN Denpasar



Nama : INDAH MAYASARI, S.H.,M.H.
NIP : 197904132002122004
Tempat Tanggal Lahir : Jember, 13 April 1979
Pangkat/Golongan : Pembina Utama Muda / (IV/c)
Jabatan : Wakil Ketua PTUN Denpasar
Email : indahmayasari@mahkamahagung.go.id
Alamat : Rumah Dinas Wakil Ketua PTUN Denpasar



Nama : SIMSON SERAN, S.H.,M.H.
NIP : 19820911 200912 1 002
Tempat Tanggal Lahir : Kupang, 11 September 1982
Pangkat/Golongan : Penata Tk.I (III/d)
Jabatan : Hakim Pratama Madya
Email : sony_crse@yahoo.co.id
Alamat : Rumah Dinas Hakim PTUN Denpasar



Nama : **DEWI YUSTITIANI, S.H., M.KN.**
 NIP : 19820206 201101 2 006
 Tempat Tanggal Lahir : Semarang, 6 Februari 1982
 Pangkat/Golongan : Penata Tk.I (III/d)
 Jabatan : Hakim Pratama Madya
 Email : deyust@yahoo.com
 Alamat : Rumah Dinas Hakim PTUN Denpasar



Nama : **IVAN PAHLAVIA ISLAMY, S.H.**
 NIP : 198711112011011007
 Tempat Tanggal Lahir : Kediri, 11 November 1987
 Pangkat/Golongan : Penata (III/c)
 Jabatan : Hakim Pratama Madya
 Email : espadaaizen76@yahoo.co.id
 Alamat : Rumah Dinas Hakim PTUN Denpasar



Nama : **MOHAMAD FAHRUZ RISQY, S.H., M.H.**
 NIP : 199001072017121001
 Tempat Tanggal Lahir : Ambon, 7 Januari 1990
 Pangkat/Golongan : Penata Muda Tk.I / (III/b)
 Jabatan : Hakim Pratama Muda
 Email : mohamadfahrurrisqy@mahkamahagung.go.id
 Alamat : Kota Denpasar

Pejabat Teknis Kepaniteraan



Nama : **WIWIED KURNIAWAN, S.H., M.H.**
 NIP : 197908301999031001
 Tempat Tanggal Lahir : Sleman, 30 Agustus 1979
 Pangkat/Golongan : Pembina Tk.I / (IV/b)
 Jabatan : Panitera
 Email : wiwiekurniawan@mahkamahagung.go.id
 Alamat : Rumah Dinas Panitera PTUN Denpasar



Nama : **I PUTU SURYADANA, S.H.**
 NIP : 19660413 199103 1 005
 Tempat Tanggal Lahir : Gelungtung, 13 April 1966
 Pangkat/Golongan : Penata TK.I / (III/d)
 Jabatan : Panitera Muda Perkara
 Email : suryadana983@gmail.com
 Alamat : Jalan Patimura No. 6 Tabanan



Nama : **I NENGAH WIJANA, S.H.**
 NIP : 19720814 199803 1 006
 Tempat Tanggal Lahir : Selisih, 14 Agustus 1972
 Pangkat/Golongan : Penata Tk. I / (III/d)
 Jabatan : Panitera Muda Hukum
 Email : nengahwijana511@gmail.com
 Alamat : Perumahan Candra Asri Batu Bulan - Sukawati

Fungsional Kepaniteraan
(Panitera Pengganti)



Nama : **NI KADEK SRI SUGIH ASIH, S,SH.**
 NIP : 19680916 199403 2 004
 Tempat Tanggal Lahir : Singaraja, 16 September 1968
 Pangkat/Golongan : Penata Tk. I / (III/d)
 Jabatan : Panitera Pengganti
 Email : deksri101@gmail.com
 Alamat : Kota Denpasar



Nama : **NI WAYAN SENITARI, S.H.**
 NIP : 19710819 199403 2 005
 Tempat Tanggal Lahir : Denpasar, 19 Agustus 1971
 Pangkat/Golongan : Penata Tk. I / (III/d)
 Jabatan : Panitera Pengganti
 Email : wsenitari@gmail.com
 Alamat : Kota Denpasar



Nama : **I WAYAN SINA, S.H.**
 NIP : 19651231 199403 1 038
 Tempat Tanggal Lahir : Bukit Auman, 31 Desember 1965
 Pangkat/Golongan : Penata Tk. I / (III/d)
 Jabatan : Panitera Pengganti
 Email : wayansina16@gmail.com
 Alamat : Braban Kediri Tabanan



Nama : **LUH PUTU ASMARIANI,S.H.**
 NIP : 19720125 199403 2 001
 Tempat Tanggal Lahir : Denpasar, 25 Januari 1972
 Pangkat/Golongan : Penata Tk. I / (III/d)
 Jabatan : Panitera Pengganti
 Email : putuasmariani@gmail.com
 Alamat : Jl. WR. Supratman Gang Remaja Denpasar



Nama : **I NYOMAN SUJANA,S.H.**
 NIP : 19641202 199493 1002
 Tempat Tanggal Lahir : Tanjung Bungkak, 02 Desember 1964
 Pangkat/Golongan : Penata TK.I/(III/d)
 Jabatan : Panitera Pengganti
 Email : nyomansujana64@gmail.com
 Alamat : Banjar Tanjung Bukak Denpasar



Nama : **NI KOMPIANG SUNARSIH,S.H.**
 NIP : 19710303 199403 2 003
 Tempat Tanggal Lahir : Denpasar, 03 Maret 1971
 Pangkat/Golongan : PenataTk.I / (III/d)
 Jabatan : Panitera Pengganti
 Email : ksunarsih71@gmail.com
 Alamat : Tohpati Denpasar



Nama : **NI LUH PUSPADEWI, S.H.**
 NIP : 19671223 199403 2 003
 Tempat Tanggal Lahir : Robokanr, 23 Desember 1967
 Pangkat/Golongan : Penata Tk. I / (III/d)
 Jabatan : Panitera Pengganti
 Email : puspa@gmail.com
 Alamat : Ubung Denpasar



Nama : **I NYOMAN TILEM, S.H.**
 NIP : 19680203 199303 1 007
 Tempat Tanggal Lahir : Karangasem, 03 Pebruari 1968
 Pangkat/Golongan : Penata Tk. I (III/d)
 Jabatan : Panitera Pengganti
 Email : nyomantilem1@gmail.com
 Alamat : Penatih Denpasar



Nama : **DESAK MADE SRI WIDARI, S.H.**
 NIP : 19780827 200303 2 001
 Tempat Tanggal Lahir : banjarangkan, 27 Agustus 1978
 Pangkat/Golongan : Penata Tingkat I (III/d)
 Jabatan : Panitera Pengganti
 Email : desaksriwidari78@gmail.com
 Alamat : Banjarangkan Klungkung Bali



Nama : **NI PUTU SUPARWATI, S.H.**
 NIP : 19830416 200904 2 008
 Tempat Tanggal Lahir : Batuan Gianyar, 16 April 1983
 Pangkat/Golongan : Penata Tk.I (III/d)
 Jabatan : Panitera Pengganti
 Email : suparwatiputu@gmail.com
 Alamat : Perumahan Polri Denpasar



Nama : **AYU SINTA DEWI KUSUMASARI, S.H.**
 NIP : 19731212 199303 2 002
 Tempat Tanggal Lahir : Singaraja, 12 Desember 1973
 Pangkat/Golongan : Penata Tk I (III/d)
 Jabatan : Juru Sita Pengganti
 Email : ayusintadewi121273@gmail.com
 Alamat : Jl. Siulan Denpasar



Nama : **KADEK AYU WINASARI P., S.E., S.H.**
 NIP : 19761008 200904 2 002
 Tempat Tanggal Lahir : Denpasar, 8 Oktober 1976
 Pangkat/Golongan : Penata Tk. I/ (III/d)
 Jabatan : Panitera Pengganti
 Email : winasari2014@gmail.com
 Alamat : Kota Denpasar

Juru Sita Pengganti



Nama : I NYOMAN ARYA YUDA BAKTI
 NIP : 197704092012121003
 Tempat Tanggal Lahir : Karang Asem , 09 April 1977
 Pangkat/Golongan : Pengatur / (II/c)
 Jabatan :Juru Sita Pengganti
 Email : aryanyoman55@gmail.com
 Alamat : Tohpati Denpasar



Nama : I NYOMAN GDE SUYANA,S.H
 NIP : 19811122 201212 1 003
 Tempat Tanggal Lahir : Denpasar, 22 November 1981
 Pangkat/Golongan : Pengatur / (II/c)
 Jabatan : Jurusita Pengganti
 Email : suyana2281@gmail.com
 Alamat : Tabanan- Bali

B. Sumber Daya Manusia Non Teknis Yudisial

a. Jumlah Sumber Daya Manusia Non Teknis Yudisial

No.	Jabatan	Jumlah
1.	Sekretaris	1 Orang
2.	Kasubag Umum dan Keuangan	1 Orang
3.	Kasubag Kepegawaian dan Ortala	1 Orang
4.	Kasubag Perencanaan, TI dan Pelaporan	1 Orang
5.	Jabatan Fungsional	5 Orang
6.	Pelaksana	3 Orang
Jumlah Sumber Daya Manusia Non Teknis Yudisial		12 Orang

b. Profil Sumber Daya Manusia Non Teknis Yudisial/Kesekretariatan

Pejabat Struktural Kesekretariatan

Nama : **Dr. NI MADE YENI WIDAYANI, S.H.,M.M.**
 NIP : 19720417 199203 2 002
 Tempat Tanggal Lahir : Tabanan, 17 April 1972
 Pangkat/Golongan : Pembina Tk.I / (IV/b)
 Jabatan : Sekretaris
 Email : yeniwidayani17@yahoo.com
 Alamat : Jl. Tunjungsari Gang Menuri No.8 Denpasar



Nama : **DRS. ANAK AGUNG GEDE SEDANA**
 NIP : 19671231 199403 1 048
 Tempat Tanggal Lahir : Gianyar, Tahun 1967
 Pangkat/Golongan : Penata TK.I / (III/d)
 Jabatan : Kepala Sub Bag. Kepegawaian, Org dan Tata Laksana
 Email : agungkaleran@gmail.com
 Alamat : Jalan batu Intan VII/24 Batubulan-Sukawati



Nama : **PUTU EKA ARYAWATI, S.H.**
 NIP : 19720819 199903 2 003
 Tempat Tanggal Lahir : Singaraja, 19 Agustus 1972
 Pangkat/Golongan : Penata Tk. I / (III/d)
 Jabatan : Kepala Sub Bag. Perencanaan, IT dan Pelaporan
 Email : ekaaryawati@gmail.com
 Alamat : Kota Denpasar



Nama : **NI LUH PUTU AYU KURNIASIH,S.E.**
 NIP : 19810315 200502 2 002
 Tempat Tanggal Lahir : bangli, 15 Maret 1981
 Pangkat/Golongan : Penata Tk.I / (III/d)
 Jabatan : Kepala Subbag Umum Dan Keuangan
 Email : kurniaputu@gmail.com
 Alamat : Kota Denpasar

Pejabat Fungsional Kesekretariatan



Nama : **KADEK SERI BUDIYANA,S.Pd.**
 NIP : 19850711 201101 1 008
 Tempat Tanggal Lahir : Bungkulan, 11 Juli 1985
 Pangkat/Golongan : Penata / (III/c)
 Jabatan : Analis Pengelolaan Keuangan APBN
 Email : d3k.boy@gmail.com
 Alamat : Kota Denpasar



Nama : **QAMARULLAH, S.Sos.**
 NIP : 19750825 199701 1 001
 Tempat Tanggal Lahir : Karangasem, 25 Agustus 1975
 Pangkat/Golongan : Penata / (III/c)
 Jabatan : Pranata Keuangan APBN Penyelia
 Email :
 Alamat : Kota Denpasar



Nama : **NI PUTU JULIARTINI,S.E.**
 NIP : 19800721 201101 2 004
 Tempat Tanggal Lahir : Br.Dukuh (Tabanan), 21 Juli 1980
 Pangkat/Golongan : Penata / (III/c)
 Jabatan : Pranata Keuangan APBN Penyelia
 Email : putuyuli83@gmail.com
 Alamat : Dalung, Badung



Nama : **DESAK TRI WISNAWATI, S.H.,S.T.**
 NIP : 19851201 200604 2 001
 Tempat Tanggal Lahir : Banjar Binong, 01 Desember 1985
 Pangkat/Golongan : Penata Muda Tk.I / (III/b)
 Jabatan : Analis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Muda
 Email : desak3wisnawati@gmail.com
 Alamat : Kota Denpasar



Nama : **MADE PARAHITA SAGUNA , ST**
 NIP : 198604222020121002
 Tempat Tanggal Lahir : Denpasar, , 22 April 1986
 Pangkat/Golongan : Penata Muda / (III/a)
 Jabatan : Pranata Komputer Ahli Pertama
 Email : mdsaguna@mahkamahagung.go.id
 Alamat : Jl.Sekar Tunjung XVI No.111X Dps



Nama : **RINI KURNIAWATI, A.Md.**
 NIP : 199012022020122001
 Tempat Tanggal Lahir : Wonogiri, 02 Desember 1990
 Pangkat/Golongan : Pengatur / (II/c)
 Jabatan : Arsiparis Keterampilan
 Email : riniqur@mahkamahagung.go.id
 Alamat : Jl. Jayagiri XIII No. 6A Dps

PELAKSANA



Nama : **LUH PUTU SUARNITI, S.Sos.**
 NIP : 19901123 201903 2 007
 Tempat Tanggal Lahir : Gianyar, 23 Nopember 1990
 Pangkat/Golongan : Penata Muda / (III/a)
 Jabatan : Analis Tata Laksana
 Email : luhputusuarniti23@gmail.com /
 luhputusuarniti23@mahkamahagung.go.id
 Alamat : Jalan Letda Reta Utara No 3 Denpasar

CPNS



Nama : **LUH PUTU UTAMI RASI MEGANTARI, S.H.**
 NIP : 199610122024052001
 Tempat Tanggal Lahir : Denpasar, 12 Oktober 1996
 Pangkat/Golongan : Penata Muda / (III/a)
 Jabatan : Analis Perkara Peradilan – CPNS
 Email : rasimegantari@mahkamahagung.go.id
 Alamat : Kota Denpasar



Nama : **I GEĐE KHRISNA DHARMA PUTRA, S.H.**
 NIP : 200104272024051001
 Tempat Tanggal Lahir : Karangasem, 16 April 1999
 Pangkat/Golongan : Penata Muda / (III/a)
 Jabatan : Analis Perkara Peradilan – CPNS
 Email : khrisnadharma08@mahkamahagung.go.id
 Alamat : Badung

Tenaga Honorer / Kontrak PTUN Denpasar



Nama : Christian Glenn Leasiwal, A.Md.
 Jabatan : Pramubakti
 Tempat Tanggal Lahir : Ambon, 21 Desember 1978
 Alamat : Denpasar



Nama : I Putu Sudiarta
 Jabatan : Sopir
 Tempat Tanggal Lahir : Denpasar, 23 Januari 1984
 Alamat : Denpasar



Nama : Kadek Arya Gunawan
 Jabatan : Pramubakti
 Tempat Tanggal Lahir : Singaraja, 17 Agustus 1987
 Alamat : Denpasar



Nama : Made Sudarma
 Jabatan : Satpam
 Tempat Tanggal Lahir : Singaraja, 3 September 1978
 Alamat : Denpasar



Nama : Ngakan Gede Nopriana
 Jabatan : Sopir
 Tempat Tanggal Lahir : Klungkung, 10 Oktober 1995
 Alamat : Denpasar



Nama : I Nyoman Putra Sedana
 Jabatan : Pramubakti
 Tempat Tanggal Lahir : Denpasar, 29 Mei 1993
 Alamat : Denpasar



Nama : Ni Putu Nita Yuni Antari Basma
 Jabatan : Pramubakti
 Tempat Tanggal Lahir : Denpasar, 19 Juni 1996
 Alamat : Denpasar



Nama : I Made Sandi Artana
 Jabatan : Pramubakti
 Tempat Tanggal Lahir : Denpasar, 27 Mei 1986
 Alamat : Denpasar



Nama : Ni Kadek Dian Rahayu, S.Pd
 Jabatan : Pramubakti
 Tempat Tanggal Lahir : Sibang Kaja, Badung/ 16 Juli 1993
 Alamat : Denpasar



Nama : I Kadek Noval Mahendra
 Jabatan : Sopir
 Tempat Tanggal Lahir : Singaraja, 28 November 2002
 Alamat : Denpasar

BAB IV
PENGELOLAAN KEUANGAN, SARANA PRASARANA
DAN TEKNOLOGI INFORMASI

A. PENGELOLAAN KEUANGAN

Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar mengelola 2 DIPA yaitu dengan Nomor : SP.DIPA-005.01.2.559861/2024 dan SP.DIPA-005.05.2.559862/2024 Tanggal 28 November 2023, DIPA dari Badan Urusan Administrasi dengan jumlah Anggaran Pagu sebesar Rp. 6.999.632.000,- terdiri dari:

No.	Program	Jumlah
1.	Layanan Sarana Internal	
	- Dukungan Manajemen Pengadaan Pelayanan Fasilitas (belanja Modal)	Rp. 283.050.000,-
	Layanan Perkantoran	
	- Gaji dan tunjangan	Rp. 5,030.196,000,-
	- Operasional dan pemeliharaan perkantoran	Rp. 1.686.386.000,-

Sedangkan DIPA dari Ditjen Badan Peradilan Militer dan TUN dengan jumlah pagu sebesar Rp 45.910.000,-

No.	Uraian	Jumlah
1.	Pengamanan Sidang	Rp. 12.400.000,-
2.	Pelaksanaan Pembebasan Biaya Perkara	Rp. 510.000,-
3.	Posbakum	Rp. 33.000.000,-

Pelaksanaan DIPA Tahun Anggaran 2024 PTUN Denpasar untuk Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung, peningkatan sarana dan prasarana aparatur Mahkamah Agung meliputi Belanja Pegawai, Belanja Barang maupun Belanja Modal. Berikut kami sampaikan data baik mengenai Pagu Anggaran, Realisasi Anggaran dan sisa anggaran dapat kami sajikan sebagai berikut :

a. Rekapitulasi Belanja Pegawai pada PTUN Denpasar:

No.	Satker	Pagu	Realisasi	Sisa
	PTUN Denpasar	Rp. 5.030.196.000,-	Rp.5.018.112.953,-	Rp 12.083.047,-

Penyerapan Anggaran untuk Belanja pegawai sebesar 98.81 %

- b. Rekapitulasi Belanja Barang Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran pada PTUN Denpasar:

No.	Satker	Pagu	Realisasi	Sisa
	PTUN Denpasar	Rp. 1.686.386.000,-	Rp. 1.615.989.731,-	Rp. 70.396.269,-

Penyerapan Anggaran untuk Belanja Barang sebesar 95.83 %

- c. Rekapitulasi Belanja Modal pada PTUN Denpasar:

No.	Satker	Pagu	Realisasi	Sisa
	PTUN Denpasar	Rp. 283.050.000,-	Rp. 282.106.500,-	Rp.943.500,-

Penyerapan Anggaran untuk Belanja Modal sebesar 99.67 %

Penyerapan Anggaran DIPA-005.01.2.559861/2024 sebesar 99.30% dari Anggaran 6.999.632.000,- terserap adalah sebesar Rp. 6.916.209.184,-

DIPA dari Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan TUN dengan nomor DIPA-005.05.2.559862/2024 penyerapan anggarannya sebesar 99.83 % dari anggaran 45.910.000,- terserap sejumlah 45.834.000,- dengan rincian sebagai berikut:

No	Kegiatan	Pagu	Realisasi	Sisa
1.	Biaya Pengamanan Sidang	Rp. 12.400.000,-	Rp. 12.400.000,-	Rp. 0,-
2.	Pelaksanaan pembebasan biaya perkara	Rp. 510.000,-	Rp. 510.000,-	Rp 0 ,-
3.	Posbakum	Rp.33.000.000,-	Rp. 32.924.000 ,-	Rp 76.000,-

Adapun *pengelolaan keuangan perkara* dengan saldo akhir per 31 Desember 2024 sebagai berikut :

1. Biaya Perkara/Panjar Biaya Perkara

No.	Kuangan Perkara	Total	Keterangan Rincian Saldo
1.	Saldo Awal	Rp. 5.271.800,-	
2.	Penerimaan	Rp. 3.311.500,-	
3.	Pengeluaran	Rp. 3.115.500,-	
	Saldo	Rp. 5.467.800,-	Saldo Akhir Rp. 5.467.800,-

2. Biaya Proses/ATK/Pemberkasan

No.	Keuangan Perkara	Total	Keterangan Rincian Saldo
1.	Saldo Awal	Rp. 2.682.590,-	
2.	Penerimaan	Rp. 300.000,-	
3.	Pengeluaran	Rp. 0,-	
Saldo		Rp. 2.882.590,-	Saldo Akhir Rp. 2.882.590,-

3. Biaya Eksekusi

No.	Keuangan Perkara	Total	Keterangan Rincian Saldo
1.	Saldo Awal	Rp. 0,-	
2.	Penerimaan	Rp. 0,-	
3.	Pengeluaran	Rp. 0,-	
Saldo		Rp. 0,-	Saldo Akhir Rp. 0,-

Uang Tunai	Rp.	1.343.300,-
Meterai	Rp.	60.000,-
Saldo Bank	Rp.	4.064.500,-
Saldo Akhir	Rp.	5.467.800,-

Selanjutnya, *Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)* per 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

No.	PNBP	Jumlah
1.	Pendapatan sewa tanah, gedung dan bangunan	Rp. 14.400.000,-
2.	Pendapatan Uang Meja (leges) dan upah pada panitera badan Peradilan	Rp. 2.350.000,-
3.	Pendapatan Ongkos Perkara	Rp. 3.940.000,-
4.	Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan lainnya	Rp. 16.987.000,-
5.	Penerimaan Kembali Belanja Lainnya TAYL	Rp. 0,-
6.	Pendapatan dari penjualan peralatan dan mesin	Rp. 79.359.000,-
Total		Rp. 117.036.000,-

B. PENGELOLAAN SARANA DAN PRASARANA

Pengelolaan Sarana dan Prasarana PTUN Denpasar Meliputi:

1. Sarana dan Prasarana Gedung;
2. Sarana dan Prasarana Fasilitas Gedung; dan Halaman Kantor
3. Pengadaan, Perawatan/Pemeliharaan dan Penghapusan

Agar lebih jelas terkait dengan Pengelolaan sarana dan Prasarana PTUN Denpasar, berikut penjelasannya:

a. TANAH

NO.	Sub Kelompok Barang	Jumlah	Keterangan
1.	Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan I	1.400 M ²	
2.	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	4.144 M ²	

b. PERALATAN DAN MESIN

Kendaraan Roda Empat			
No	Jenis Kendaraan	Kondisi	Asal Perolehan
1.	Toyota Vios Tahun 2007	baik	Hibah dari MARI
2.	Station Wagon(Kijang Inova) Tahun 2009	Baik	Hibah dari Gubernur Bali
3.	Station Wagon(Grand Levina 1.5 S) Tahun 2011	Sudah dilelang	Pengadaan
4.	Station Wagon(Grand Levina SV) Tahun 2012	Sdah dilelang	Pengadaan
5.	Station Wagon(Kijang Inova 2.0 V A/T) Tahun 2017	Baik	Hibah dari Gubernur Bali
6.	Station Wagon (Kijang Inova 2.0 V A/T) Tahun 2018	Baik	Hibah dari Bupati Badung
7.	Station Wagon (Kijang Inova 2.0 V A/T) Tahun 2018	Baik	Hibah dari Bupati Badung

Kendaraan Roda DUA			
1.	Honda Tahun 2005	1 unit	Pengadaan
2.	Honda Tahun 2005	1 unit	Pengadaan
3.	Honda Tahun 2007	1 unit	Pengadaan
4.	Honda Tahun 2007	1 unit	Pengadaan
5.	Honda Tahun 2007	1 unit	Pengadaan
6.	Honda Tahun 2007	1 unit	Pengadaan
7.	Honda Tahun 2007	1 unit	Pengadaan
Rumah Dinas			
1.	Rumah Dinas Ketua	1 unit	
2.	Rumah Dinas Wakil Ketua	1 unit	
3.	Rumah Dinas Hakim	4 unit	
4.	Rumah Dinas Panitera	1 unit	
Peralatan dan Mesin lainnya		Jumlah	Keterangan
1.	Mesin Ketik Manual Portable(11-13 Inchi)	1	
2.	Mesin Ketik Manual Standar (14-16 Inchi)	7	
3.	Mesin Ketik Manual Langewagon (18-27 Inchi)	1	
4.	Mesin Hitung Elektronik	2	
5.	Lemari Besi/Metal	53	
6.	Lemari Kayu	31	
7.	Rak Besi	1	
8.	Rak Kayu	9	
9.	Filing Kabinet Besi	33	
10.	Brankas	2	
11.	Tabung Pemadam Api	2	
12.	CCTV	4	
13.	White Board	11	
14.	LCD Proyektor/infokus	3	
15.	Mesin Antrian	1	
16.	Perkakas Kantor Lainnya	2	

17.	Alat Kantor Lainnya	1	
18.	Meja Kerja Kayu	112	
19.	Kursi Besi/Metal	246	
20.	Kursi Kayu	79	
21.	Sice	17	
22.	Meja Rapat	9	
23.	Meja Komputer	27	
24.	Tempat Tidur Besi	1	
25.	Partisi	4	
26.	Nakas	3	
27.	Jam Elektronik	7	
28.	Mesin Penghisap debu/Vacum Cleaner	1	
29.	Mesin Pemotong Rumput	1	
30.	Lemari Es	2	
31.	AC Window	4	
32.	AC Split	41	
33.	Kipas Angin	4	
34.	Televisi	13	
35.	Tape Recorder	1	
36.	Amplifier	3	
37.	Loudspeaker	14	
38.	Sound System	5	
39.	Microphone	10	
40.	Microphone Table Stand	7	
41.	Stabilisator	3	
42.	Lambang Garuda Pancasila	2	
43.	Gambar Presiden/Wakil Presiden	1	
44.	Tiang Bendera	2	
45.	Tangga Aluminium	2	
46.	Dispenser	3	
47.	Mimbar/Podium	1	

48.	Palu Sidang	2	
49.	Lambang Instansi	1	
50.	Handy Cam	1	
51.	Sun Screen	1	
52.	Microphone wireless mic	1	
53.	UPS	10	
54.	Running Tex	1	
55.	Camera Digital	2	
56.	Camera Conference	1	
57.	Telephone(PABX)	1	
58.	Facsimile	2	
59.	Wireless Amplifier	1	
60.	Finger Printer Time	2	
61.	Komputer Jaringan Lainnya	1	
62.	P.C. Unit	58	
63.	Lap Top	36	
64.	Monitor	2	
65.	Note book	1	
66.	Printer	49	
67.	Scanner	8	
68.	Server	3	
69.	Router	1	
70.	Rak Server	1	
71.	Alat Tenis Meja	1	

c. GEDUNG DAN BANGUNAN

NO.	KELOMPOK BARANG	JUMLAH	KETERANGAN
1.	Bangunan Gedung Kantor Permanen	2	
2.	Bangunan Gedung Tempat Ibadah Permanen	1	
3.	Gedung Pos Jaga Permanen	1	

4.	Gedung Garasi	2	
5.	Rumah Negara Golongan I Tipe C Permanen	7	
6.	Pagar Permanen	1	

Rumah Dinas

- 1) Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar mempunyai rumah dinas sebanyak 7 unit dengan ukuran type C/70. lokasi rumah dinas ada 2 yaitu :
 - i. Lokasi terletak di jalan Sari Gading gang Gading Mas Denpasar sebanyak 4 unit;
 - ii. Lokasi terletak di jalan Padma Penatih Denpasar sebanyak 3 unit
- 2) Ada 1 (satu) unit rumah dinas yang rusak berat dan tidak bisa di tempati ada 4 (empat) rumah dinas yang perlu diperbaiki dan direnovasi
- 3) Perlu kami informasikan bahwa rumah dinas yang tersedia 7 unit tersebut masih kurang jumlahnya dan yang layak ditempati hanya 6 (enam) unit karena ada 1 (satu) unit rumah dinas yang rusak berat, untuk Ketua, Wakil Ketua, Hakim dan panitera dan Sekretaris sehingga masih ada hakim yang tidak mendapatkan rumah dinas sehingga sewa dan mendapat bantuan sewa rumah dinas yang dibiayai oleh DIPA Pengadilan TUN Denpasar;

C. PENGELOLAAN TEKNOLOGI INFORMASI

Di Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar telah dilakukan pengelolaan teknologi informasi yang dilakukan secara berkala. Adapun pengelolaan yang telah dilakukan adalah dilakukan sinkronisasi secara berkala yaitu setiap dua kali sehari ke SIPP Web maupun SIPP Mahkamah Agung. Hal tersebut bertujuan untuk menyamakan data yang ada pada database lokal agar sama dengan database yang ada pada server remote. Selain itu dilakukan juga backup secara berkala yang meliputi pencadangan database SIPP lokal, data sipernik, data E-API, database dan sistem website instansi. Selain pengelolaan sistem informasi, dilaksanakan juga pengelolaan jaringan. Pada pengelolaan jaringan, kabel yang terdapat pada ruangan server diberikan label untuk mengetahui tujuan kabel tersebut sehingga memudahkan dalam maintenance. Selain itu dilaksanakan monitoring dan evaluasi pemanfaatan TI dan Jaringan secara rutin pada setiap bulannya untuk mengetahui respons pengguna pada masing-masing ruangan terhadap kualitas jaringan internet.

Permasalahan umum yang ditemui khususnya dalam pemanfaatan internet adalah kurang stabilnya koneksi internet. Hal tersebut disebabkan keadaan listrik yang kurang daya sehingga menyebabkan padam listrik. Hal tersebut kemudian diantisipasi dengan menaikkan daya listrik, sehingga kualitas dari perangkat dan jaringan internet menjadi membaik.

Pengelolaan Teknologi Informasi dilakukan dengan membuat publikasi kegiatan yang telah dilaksanakan ke website maupun media sosial. Informasi yang ditampilkan secara berkala dilakukan pembaruan yang meliputi berita, pengumuman, informasi pelayanan, statistik IKM dan IPK, galeri foto, pembuatan dan pengunggahan video kegiatan, serta pembaruan informasi yang relevan untuk masyarakat.

BAB V

PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK

- AKREDITASI PENJAMINAN MUTU

Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar sebagai institusi hukum memiliki kewajiban memberikan pelayanan peradilan kepada masyarakat pencari keadilan yang mencakup wilayah hukum Propinsi Bali, dituntut untuk dapat menjalankan kekuasaan kehakiman yang merdeka, tidak memihak, cepat, sederhana dan biaya ringan.

Kepuasan dan kepercayaan pencari keadilan, hanya dapat diperoleh dengan memenuhi harapan dan keinginan, melalui penerapan suatu sistem manajemen yang dirancang untuk dapat menanggapi kebutuhan dan harapan pencari keadilan secara cepat, tepat, berkualitas, transparan dan melakukan perbaikan atau peningkatan secara berkelanjutan.

Melalui pelaksanaan kegiatan Akreditasi Penjamin Mutu, Pimpinan dan seluruh jajaran Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar bertekad untuk senantiasa konsisten dalam memenuhi persyaratan, harapan dan keinginan para pencari keadilan, serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan, untuk meningkatkan kinerja institusi, kepercayaan publik, kepuasan pencari keadilan dan pihak-pihak lain yang berkepentingan.

Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar dalam melaksanakan assessment ini tujuannya adalah ingin mengetahui kemampuan masing-masing pengadilan dalam mewujudkan nilai-nilai yang unggul di masing-masing peradilan yang berlaku universal antara lain adalah mandiri, berintegritas, akuntabel, responsible, transparan, ketidakberpihakan perlakuan yang sama di Muka Hukum. Melalui penilaian akreditasi ini yang terdapat 7 (tujuh) area yang akan dievaluasi, yaitu :

1. Manajemen kepemimpinan dan sumber daya manusia
2. Pola bindalmin dan SOP penyelesaian perkara
3. Sarana dan prasarana pengadilan
4. Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) dan Aplikasi berbasis IT lainnya
5. Pedoman pelayanan meja informasi dan pengaduan

6. PNBPN dan biaya proses penyelesaian perkara
7. Pedoman pemberian layanan hukum bagi masyarakat tidak mampu.

Akreditasi Penjaminan Mutu yang penilaiannya dilaksanakan oleh internal dan eksternal Mahkamah Agung pada tanggal 24 sampai dengan 26 Oktober 2017 dengan nilai 88,14, memperoleh nilai B “Akreditasi B”(Baik)



Surveillance I pada tanggal 12 sampai dengan 14 Pebruari 2020 dengan nilai 92,95 terakreditasi “A” (Sangat Baik)

Telah disetujui dalam rapat pleno Tim Akreditasi Penjaminan Mutu Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara pada tanggal 17 Nopember 2020.



- PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (PTSP)

Bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan guna mewujudkan pelayanan yang cepat, mudah, transparan, terukur, dan terjangkau perlu dilaksanakan perubahan system pelayanan. Bahwa perubahan system pelayanan tersebut adalah pelayanan yang dilaksanakan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap awal sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan, Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar pada mulai tanggal 13 Agustus 2018 telah menyediakan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) berdasarkan Pedoman Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) sebagai mana keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara Nomor 109/DJMT/KEP/VII/2024 tentang Pedoman Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Dan Pengadilan Tata Usaha Negara.

Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar sesuai dengan surat edaran Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara Nomor: 962/Djmt/B/8/2018 perihal Lomba PTSP di lingkungan Peradilan Tata

Usaha Negara 2018, Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar mendapat piagam penghargaan “Juara Harapan I”.



I. PENGELOLA PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (PTSP) PADA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA DENPASAR

1. Meja Kasir;
2. Meja Satu, yang di dalamnya terdapat Meja e-Court yang dilengkapi dengan alat pindai (scanner);
3. Meja Tiga, yang di dalamnya juga terdapat pelayanan Image;
4. Meja Informasi dan Meja Pengaduan; serta
5. Meja Penerimaan Surat.

Tugas Petugas PTSP pada Pengadilan Tata Usaha Negara :

a. Petugas PTSP pada Kepaniteraan Muda Perkara bertugas melayani secara elektronik/konvensional melalui PTSP :

- 1) Menerima pendaftaran perkara Gugatan.
- 2) Menerima pendaftaran perkara Permohonan.
- 3) Menerima pendaftaran perkara Perlawanan.
- 4) Menerima permohonan masuknya Pihak yang berkepentingan.
- 5) Menerima pembayaran panjar biaya Pemeriksaan Setempat.
- 6) Menerima permohonan pemeriksaan Saksi/Ahli secara audio visual.
- 7) Menerima pendaftaran permohonan Banding dan Kasasi.
- 8) Menerima memori/kontra memori Banding dan Kasasi.

- 9) Menerima permohonan Peninjauan Kembali, khusus untuk alasan Peninjauan Kembali dengan mendasarkan ditemukannya bukti baru, maka dilengkapi dengan permohonan sumpah atas ditemukannya bukti baru tersebut.
- 10) Menerima permohonan pengembalian sisa panjar biaya perkara Menerima permohonan dan pengambilan salinan resmi putusan/penetapan.
- 11) Menerima Permohonan Eksekusi dan Pengawasan Eksekusi.
- 12) Menerima permohonan pencabutan Gugatan, Permohonan, Banding, Kasasi, Peninjauan Kembali dan Eksekusi.
- 13) Pelayanan lainnya yang berhubungan dengan proses dan informasi penyelesaian sengketa Tata Usaha Negara.

b. Petugas PTSP pada Kepaniteraan Muda Hukum bertugas melayani :

- 1) Permohonan surat keterangan tidak tersangkut perkara Tata Usaha Negara.
- 2) Permohonan izin kepada Ketua Pengadilan untuk melaksanakan penelitian dan riset.
- 3) Permohonan keterangan data perkara dan salinan putusan perkara yang telah berkekuatan hukum tetap.
- 4) Menerima permohonan pendaftaran surat kuasa dan permohonan izin beracara sebagai Kuasa Insidentil.
- 5) Permohonan informasi dan memberikan informasi sesuai Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor : 2-144/ KMA/SK/VIII/ 2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan.
- 6) Permohonan informasi kepada pimpinan atau pegawai tertentu apabila diperlukan untuk menyediakan informasi yang diminta pemohon.
- 7) Penanganan pengaduan/SIWAS MA-RI.
- 8) Pelayanan lain yang berhubungan dengan pelayanan jasa hukum.

c. Petugas PTSP pada Kesekretariatan bertugas melayani :

- 1) Menerima seluruh surat masuk.
- 2) Menyampaikan surat kepada Pengguna Layanan

II. ALUR PENYELESAIAN LAYANAN TERPADU SATU PINTU (PTSP) DI LINGKUNGAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA DENPASAR



- INOVASI PELAYANAN PUBLIK

a. Implementasi SI WAYAN PLUS

SI WAYAN PLUS atau sistem informasi Whatsapps Pelayanan merupakan sebuah inovasi menggunakan aplikasi pesan whatsapp yang dilengkapi dengan fitur balas pesan otomatis. Inovasi tersebut dibangun disebabkan seringkali masyarakat mengalami kesulitan dalam mendapatkan informasi ataupun publik sering mendapatkan informasi yang keliru dikarenakan tidak adanya platform atau media resmi yang lengkap dan mudah untuk diakses sehingga di media tersebut dapat dicari segala sesuatu yang diperlukan. Publik juga sering melakukan kesalahan ataupun kekurangan berkas dikarenakan informasi yang didapat kurang, hal ini menyebabkan banyak waktu yang terbuang untuk melengkapi berkas dan kembali ke tempat pelayanan publik.

Peningkatan kualitas pelayanan publik selalu menjadi isu strategis dari setiap instansi penyelenggaraan pelayanan. Seiring perkembangan zaman yang menuntut efektivitas dan efisiensi pelayanan berbasis Teknologi Informatika seperti saat ini,

merupakan suatu keharusan bagi para pelayan publik untuk memunculkan ide-ide baru yang mampu membawa perubahan positif kepada lembaga. Berangkat dari permasalahan tersebut PTUN Denpasar berupaya menghadirkan solusi dalam pelayanan informasi yaitu dengan menghadirkan SI WAYAN PLUS. Pemilihan aplikasi whatsapp sebagai basis aplikasi dikarenakan banyaknya masyarakat yang lebih menggunakan layanan whatsapp sebagai media perpesanan instan sehingga lebih efektif menjangkau masyarakat luas.

Adapun menu dari SI WAYAN PLUS yaitu:

1. Informasi Panjar Biaya Perkara/PNBP
2. Jadwal Sidang & Informasi Perkara
3. Informasi Posbakum
4. Layanan Pengaduan
5. Informasi Lainnya

b. Implementasi SI SANTI PLUS

SI SANTI PLUS merupakan singkatan dari Single Service Administrasi Terintegrasi Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar yang mana mempermudah masyarakat dalam mengajukan:

1. Permohonan Kuasa Insidentil
2. Permohonan Keterangan Bebas Perkara
3. Permohonan Penelitian

Aplikasi SI SANTI PLUS ini di buat untuk mempermudah dalam pelaksanaan pelayanan berbasis elektronik pada Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar. Sebelum hadirnya SI SANTI PLUS masyarakat yang ingin mendapat pelayanan khususnya pembuatan surat bebas perkara dan lain sebagainya harus datang ke kantor PTUN Denpasar. Tentu saja ini kurang efisien manakala masyarakat yang membawa berkas persyaratan administrasi, setelah diperiksa petugas ternyata dokumen tersebut belum lengkap sehingga banyak biaya dan waktu yang terbuang untuk melengkapi dokumen tersebut. Untuk menanggulangi hal tersebut dibangun inovasi SI SANTI PLUS yang tujuan dari penerapannya adalah untuk memudahkan masyarakat pencari keadilan mendapatkan layanan pada Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar berupa permohonan pembuatan surat keterangan bebas perkara, surat permohonan kuasa insidentil, dan permohonan

penelitian secara daring, sehingga jika persyaratan belum terpenuhi, masyarakat tidak perlu datang kembali membawa berkas ke kantor tetapi hanya mengunggah ke sistem SI SANTI PLUS. Untuk mendapatkan layanan tersebut dapat diakses melalui alamat <https://sisanti.ptun-denpasar.go.id>.

c. Impementasi PTSP Online

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang pesat saat ini mendorong kemudahan dalam penyebarluasan informasi yang semakin mudah dijangkau. Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Denpasar sebagai salah satu lembaga peradilan di bawah Mahkamah Agung berkomitmen untuk memberikan pelayanan maksimal kepada para pencari keadilan dan masyarakat umum dalam hal akses informasi.

Media yang dimanfaatkan oleh PTUN Denpasar adalah penggunaan website pengadilan untuk memberikan informasi kepada masyarakat. Akan tetapi sejauh ini proses pengelolaannya terutama untuk pemanfaatan dalam mempublikasikan informasi layanan pengadilan masih belum optimal. Penataan informasi yang terpisah-pisah menyulitkan untuk diakses, sedangkan di sisi lain, informasi layanan pengadilan merupakan hal penting yang perlu diketahui secara jelas oleh masyarakat, khususnya oleh para pihak pencari keadilan baik masyarakat umum maupun yang berkebutuhan khusus yaitu dari penyandang disabilitas.

Hadirnya Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Online pada Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar diharapkan mampu meningkatkan pelayanan dalam menyediakan dan mendistribusikan informasi kepada masyarakat sehingga akan menghemat waktu dan biaya tanpa harus datang ke kantor PTUN Denpasar. Pada PTSP Online ini telah dilengkapi dengan alat pembaca layar (screen reader) sehingga pengguna tunanetra dapat memahami isi dari informasi yang tertulis. Adanya PTSP secara online diharapkan dapat mewujudkan peradilan yang inklusif dengan tidak membedakan para pencari keadilan untuk mendapatkan informasi mengenai produk/layanan yang ada di PTUN Denpasar.

BAB VI

PENGAWASAN

A. INTERNAL

Dalam Lampiran I Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: KMA/080/SK/VIII/ 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan di lingkungan Lembaga Peradilan, Nomor 145/KMA/SK/VIII/2007 tanggal 29 Agustus 2007 tentang pemberlakuan Buku IV Pedoman Pelaksanaan Pengawasan di Lingkungan Badan – Badan Peradilan.

PERMA Nomor 7 Tahun 2016 tentang penegakan disiplin kerja Hakim pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang ada di bawahnya.

PERMA Nomor 8 Tahun 2016 tentang pengawasan dan pembinaan atasan langsung di lingkungan Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya.

PERMA Nomor 9 Tahun 2016 tentang pedoman penanganan pengaduan (whistleblowing system) di Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya. Disebutkan mengenai pengertian umum Pengawasan Internal yaitu pengawasan dari dalam lingkungan peradilan sendiri yang mencakup 2 jenis pengawasan yaitu: Pengawasan Melekat dan Pengawasan Fungsional.

Pengertian Pengawasan Melekat itu sendiri dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI tersebut diartikan sebagai serangkaian kegiatan yang bersifat sebagai pengendalian yang terus menerus yang dilakukan oleh atasan langsung kepada bawahannya secara preventif dan represif, agar pelaksanaan tugas bawahan tersebut berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan rencana kegiatan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sedangkan Pengawasan Fungsional diartikan sebagai pengawasan yang dilakukan oleh aparat pengawasan yang khusus ditunjuk untuk melaksanakan tugas tersebut dalam satuan kerja tersendiri yang diperuntukkan untuk itu. Di lingkungan lembaga peradilan Pengawasan Fungsional ini dilaksanakan oleh Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI.

Bertitik tolak dari pengertian Pengawasan Internal sebagaimana telah disebutkan diatas, maka Laporan Kegiatan Pengadilan mengenai Pengawasan Internal ini dikhususkan pada jenis pengawasan melekat yang telah dilakukan oleh Pimpinan Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar sepanjang Tahun 2024, sedangkan Pengawasan Fungsional merupakan kewenangan dari Badan Pengawas Mahkamah Agung RI.

Dalam melaksanakan pengawasan melekat, Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar selain melakukan pengawasan langsung yaitu dengan cara melakukan pemeriksaan pada bidang Kepaniteraan dan Kesekretariatan juga telah menunjuk Koordinator dan Hakim Pengawas Bidang sesuai dengan surat Keputusan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar No: 863.2/KPTUN.W7-TUN3/SK.HK1.2.5/VIII/2024 tanggal 30 Agustus 2024 yaitu :

DAFTAR HAKIM PENGAWAS BIDANG

No.	Nama/NIP	Pengawas Bidang
1.	Indah Mayasari, S.H., M.H.	Koordinator Pengawas
2.	Simson Seran, S.H, M.H.	1. Pengawas Bidang Kepaniteraan Muda Perkara 2. Pengawas PTSP, SIPP dan E-Court
3.	Ivan Pahlavia Islamy, S.H.	Pengawas Bidang Kepaniteraan Muda Hukum
4.	Dewi Yustitiani, S.H., M.Kn.	Pengawas Bidang Kepegawaian dan Ortala
5.	Mohamad Fahrur Risqy, S.H., M.H.	1. Pengawas Bidang Perencanaan, TI dan Pelaporan 2. Pengawas Bidang Umum dan Keuangan

Hakim Pengawas telah melaksanakan tugasnya sesuai dengan bidangnya masing-masing dan melaporkan hasil pengawasannya kepada Koordinator Pengawas yaitu Indah Mayasari, S.H., M.H.. setiap bulan sekali. Setelah itu, Koordinator Pengawas menyampaikan hasil pengawasan tersebut kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar.

Selain itu, Ketua juga membentuk Satuan Pengawasan Internal (SPI) yang bertugas mengawasi Penyerapan Anggaran dengan Surat Keputusan Ketua PTUN Denpasar Nomor 825.2/KPTUN.W7-TUN3/SK.HK1.2.5/VIII/2024 Tentang Pembentukan Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada PTUN Denpasar tanggal 13 Agustus 2024 yaitu:

DAFTAR NAMA SATUAN PENGAWASAN INTERNAL

No.	Nama	Jabatan	Jabatan dalam SPI
1.	Indah Mayasari, S.H.,M.H.	Wakil Ketua	Ketua
2.	Luh Putu Asmariansi, S.H.	Panitera Pengganti	Sekretaris

No.	Nama	Jabatan	Jabatan dalam SPI
3.	Ivan Pahlavia Islamy, S.H.	Hakim Pratama Utama	Anggota
4.	Wiwied Kurniawan, S.H., M.H.	Panitera	Anggota
5.	I Putu Suryadana, S.H.	Panitera Muda Perkara	Anggota
6.	I Nengah Wijana, S.H.	Panitera Muda Hukum	Anggota

Dibentuk pula Surat Keputusan Ketua PTUN Denpasar Nomor: 844.2 /KPTUN.W7-TUN3/SK.HK1.2.5/VIII/2024 tanggal 13 Agustus 2024 tentang Pengawasan Disiplin Hakim, Pegawai dan PPNPN Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar.

DAFTAR NAMA PENGAWAS PEGAWAI PTUN DENPASAR

No.	Nama	Jabatan	Jabatan Pengawas Pegawai
1.	Anna Leonora Tewernussa, S.H., M.H.	Ketua	Pembina
2.	Indah Mayasari, S.H.,M.H.	Wakil Ketua	Ketua
3.	Drs. Anak Agung Gede Sedana	Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Ortala	Sekretaris
4.	Dewi Yustitiani, S.H., M.Kn..	Hakim	Anggota
5.	Wiwied Kurniawan, S.H.,M.H.	Panitera	Anggota
4.	Ni Made Yeni Widayani, S.H.,M.M.	Sekretaris	Anggota

B. EVALUASI

Secara umum pelaksanaan tugas telah berjalan sesuai prosedur dan peraturan yang berlaku, yaitu:

a. KEPANITERAAN PERKARA

Dalam melaksanakan tugas sudah sesuai dengan prosedur dan peraturan serta petunjuk teknis yang berlaku.

b. KEPANITERAAN HUKUM

Dalam melaksanakan tugas sudah sesuai dengan prosedur dan peraturan serta petunjuk teknis yang berlaku.

c. SUB BAGIAN PERENCANAAN, TI DAN PELAPORAN

Dalam melaksanakan sudah sesuai dengan prosedur dan petunjuk teknis yang berlaku serta mengacu pada rencana kerja.

d. SUB BAGIAN KEPEGAWAIAN DAN ORTALA

Dalam melaksanakan sudah sesuai dengan prosedur dan petunjuk teknis yang berlaku serta mengacu pada rencana kerja.

e. SUB BAGIAN UMUM DAN KEUANGAN

Dalam melaksanakan sudah sesuai dengan prosedur dan petunjuk teknis yang berlaku serta mengacu pada rencana kerja.

Dari hasil penilaian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2023, yang dilaksanakan oleh Pengadilan Tingkat Banding yaitu Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Mataram, Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar memperoleh nilai kinerja sebesar 75,15 (BB) yang penilaiannya sudah kami terima dengan surat Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Mataram Nomor: 1011/WKPTTUN.W7/OT1.6/XII/2024 Tanggal 4 Desember 2024

BAB VII

PENUTUP

a. **KESIMPULAN**

Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar yang berada dibawah Mahkamah Agung Republik Indonesia selalu berusaha memberikan pelayanan peradilan kepada masyarakat pencari keadilan berusaha untuk memberikan pelayanan yang terbaik yaitu **cepat, prosedural dan transparan**. Hal ini dibuktikan dengan Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar akan selalu memberi pelayanan prima dengan mengutamakan kepuasan pelayanan publik, terbukti dengan sudah pernah mengikuti sertifikat ISO sejak 21 Desember 2015 dan sudah akreditasi penjaminan mutu Tahun 2017 dan Tahun 2020 serta sudah meraih predikat Wilayah Bebas dari Korupsi(WBK) sejak 20 Desember 2021

Untuk itu beberapa hal penting yang telah dilakukan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar adalah:

- a. Dalam menyelesaikan setiap perkara diupayakan tidak melebihi tenggang waktu 5 (lima) bulan, sesuai dengan kebijakan yang diterapkan oleh Mahkamah Agung R.I.;
- b. Tugas-tugas di bidang teknis maupun non teknis sudah berjalan dengan baik;
- c. Penyerapan anggaran pada DIPA tahun 2024 telah terserap sesuai dengan peruntukannya, DIPA 01 penyerapan anggaran sebesar 98,81% dan DIPA 05 penyerapan anggarannya sebesar 99,83%;
- d. Minutasi Perkara telah di laksanakan dalam waktu 1 hari setelah putusan ditanda tangan majelis hakim;
- e. Dalam pelaksanaan kegiatan kerja di PTUN Denpasar secara intern melakukan pengawasan baik oleh pimpinan dan pejabat Struktural, Fungsional dan juga oleh Hakim-Hakim pengawas bidang;
- f. PTUN Denpasar telah melakukan pelaporan yang berkaitan dengan kegiatan Kesekretariatan dan Kepaniteraan ke Pengadilan Tinggi TUN Surabaya, Dirjen MILTUN dan Mahkamah Agung melalui email dan dikirim langsung;
- g. Telah dilakukan pengelolaan dan pengembangan Teknologi Informasi secara maksimal sesuai dengan sarana dan prasarana yang tersedia;
- h. Rapat Bulanan dan Pembinaan dari Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar dilakukan setiap bulan;

- i. Rapat Bulanan Kepaniteraan dan Rapat Bulanan Kesekretariatan Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar dilakukan setiap bulan;
- j. Evaluasi Kinerja dilakukan setiap tiga bulan sekali.

b. **REKOMENDASI**

Dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan, beberapa hal yang perlu untuk ditingkatkan di lingkungan Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar baik itu untuk peningkatan kemampuan dan kompetensi Sumber Daya Manusia maupun sarana dan prasarana pendukung layanan, diantaranya:

1. Malaksanakan renovasi Gedung Kesekretariatan mengingat bangunannya yang sudah lama, banyak bocor dan kayunya dimakan rayap;
2. Rumah dinas yang ada berjumlah 7 unit semuanya type C, direnovasi baru 2 unit jadi yang 5 unit lagi dalam keadaan kurang layak perlu dilakukan renovasi;
3. Kebutuhan sumber daya manusia memiliki kemampuan dan kompetensi di bidangnya, maka pada tahun 2026 diharapkan adanya penambahan pegawai Pranata Komputer, Analis Perencanaan, Analis Akuntabilitas Kinerja Aparatur, Analis Kepegawaian, Pengelola Simak BMN, guna meningkatkan kinerja pada PTUN Denpasar;
4. Pelatihan dan Pengembangan kapasitas diri sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing

Demikian Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2024 Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar kami buat sebagai evaluasi kinerja yang sudah kami laksanakan di Tahun 2024.

Denpasar, 13 Januari 2025
Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar
Ketua,



ANNA LEONORA TEWERNUSSA